



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sosiologi Masyarakat Pesisir

RD. SITI SOFRO SIDIQ





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

SOSIOLOGI MASYARAKAT PESISIR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RD. SITI SOFRO SIDIQ

Buku AJAR

SOSIOLOGI MASYARAKAT PESISIR

Penerbit **Taman Karya**
Pekanbaru
2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Buku AJAR
SOSIOLOGI
MASYARAKAT PESISIR

Penulis:
Rd. Siti Sofro Sidiq

Editor:
Andri Sulistyani

Sampul:
Syam_Witra

Layout:
Arnain '99

Cetakan I:
Oktober 2019

Penerbit
TAMAN KARYA
Puri Alam Permai C/12 Pekanbaru
E-mail: arnain.99@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN 978-623-7512-65-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

PRAKATA PENULIS

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah –Nya, sehingga Buku Ajar *Sosiologi Masyarakat Pesisir* ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini didasari dari sumber-sumber empiris hasil penelitian dari areal lingkungan pesisir dan literatur yang relevan serta hasil diskusi pada tataran sebidang ilmu.

Ucapan terima kasih dari penulis yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang berjasa, diantaranya adalah:

1. Ketua LPPM Universitas Riau, Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP dan jajarannya yang memberikan peluang untuk meraih penelitian, sehingga buku sebagai dasar proses pembelajaran bagi mahasiswa telah terwujud.
2. Ketua LPPMP Universitas Riau, Prof. Dr. H. Zulkarnain, SE., MM, dan jajarannya yang telah memberikan peluang untuk beraktivitas sebagai staf pengajar, sehingga buku terwujud.
3. Dekan FISIP, Dr. Syafri Harto, M.Si, dan jajarannya yang telah memberikan peluang merealisasikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga terwujud buku hasil penelitian
4. Tim dalam penelitian Dr. Zahtamal, SKM dan Andri Sulistyani, SS., MSc mendampingi penelitian pada masyarakat pesisir, sehingga lancar dan optimal khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

5. Mahasiswa Sosiologi yang penuh semangat, dan mendampingi untuk mewujudkan data di lingkungan daerah penelitian, sehingga kegiatan berlangsung baik dan sesuai harapan.

Kegiatan yang sangat berarti ini merupakan tanggung jawab moral dalam menerima amanah.

Buku ini tentunya masih banyak kekurangan, kelemahan yang disebabkan terbatasnya informasi, pengalaman, sehingga untuk menghimpun pembuatan buku belum memadai. Dalam kesempatan ini penulis membuka peluang untuk menerima kritik dan saran bagi penyempurnaan buku selanjutnya.

Harapan penulis, semoga hal ini memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	5
DAFTAR ISI	7
BAB I SOSIOLOGI	
A. Pengertian Sosiologi.....	11
B. Sejarah dan Perkembangan Sosiologi.....	12
C. Sosiologi Masyarakat Pesisir	15
D. Pertanyaan Latihan	16
BAB II KONSEP WILAYAH PESISIR	
A. Pengertian Wilayah Pesisir	19
B. Tipologi Wilayah Pesisir	21
C. Karakteristik Masyarakat Pesisir	22
D. Pertanyaan Latihan	24
BAB III SUMBERDAYA PESISIR	
A. Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir	27
B. Sumberdaya Manusia Masyarakat Pesisir	31
C. Potensi Wilayah Pesisir	32
D. Pertanyaan Latihan	32
BAB IV ASPEK STRUKTURAL MASYARAKAT PESISIR	
A. Pengertian Stratifikasi Sosial.....	35
B. Dimensi Pelapisan Sosial.....	39
C. Diferensiasi Sosial	40
D. Teori-Teori dalam Stratifikasi Sosial.....	41
E. Pertanyaan Latihan.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BAB V EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	
A. Pengertian Ekonomi Masyarakat Pesisir	47
B. Pengelolaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	48
C. Pertanyaan Latihan	50
BAB VI KEKAYAAN MASYARAKAT PESISIR	
A. Kekayaan Sumberdaya Alam.....	53
B. Kekayaan Sumber Daya Manusia	55
C. Pertanyaan Latihan	57
BAB VII INTERAKSI DAN KONFLIK	
A. Pengertian Interaksi	61
B. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial	62
C. Pengertian Konflik	64
D. Model Resolusi Konflik Masyarakat Pesisir	66
E. Pertanyaan Latihan.....	70
BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	73
B. Prinsip Pemberdayaan.....	76
C. Tahapan Proses Pemberdayaan Masyarakat	77
D. Pertanyaan Latihan	78
BAB IX PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR	
A. Pengertian Perubahan Sosial	81
B. Faktor-Faktor Perubahan Sosial Masyarakat Pesisir	83
C. Pertanyaan Latihan	85
BAB X PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI MASYARAKAT PESISIR	
A. Pengertian Teknologi Informasi	89
B. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Masyarakat Pesisir	90
C. Pertanyaan Latihan	91
BAB XI MASYARAKAT PESISIR & KEMISKINAN	
A. Pengertian Kemiskinan.....	95
B. Teori-Teori Kemiskinan.....	100
C. Paradigma Kemiskinan Masyarakat Pesisir	102
D. Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Pesisir	106
E. Kategori Kemiskinan Masyarakat Pesisir	107
F. Pertanyaan Latihan	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan I
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah dan perkembangan ilmu sosiologi dasar termasuk sosiologi masyarakat pesisir.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sosiologi dan ruang lingkungannya;
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan sosiologi;
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian masyarakat pesisir dan ruang lingkungannya.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian sosiologi dan ruang lingkungannya;
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan sosiologi;
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian masyarakat pesisir dan ruang lingkungannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB I SOSIOLOGI

A. Pengertian Sosiologi

Menurut Soekamto (1970:3), sosiologi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu *Socius* dan *Logos*. *Socius* adalah kawan kelompok, sedangkan *logos* berarti uraian atau pengetahuan. Atas dasar pengertian demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lain, yang secara umum disebut masyarakat.

Pengertian yang sederhana tentang sosiologi seperti di atas tampak dalam beberapa batasan tentang sosiologi yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Seperti yang diungkapkan oleh Ogburn dan Nimkoff (1962:9) bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Roucek dan Warren (1995:3) mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.

Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis tentang kehidupan berkelompok manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya yang secara umum disebut masyarakat. Sosiologi disisi lain sebagai ilmu yang membicarakan tentang aspek-aspek kemasyarakatan. Ilmu sosiologi digunakan untuk masyarakat itu sendiri dan diciptakan oleh masyarakat demi terjalinya hubungan yang harmonis antara satu anggota masyarakat dengan yang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sosiologi disebut sebagai ilmu yang berdiri sendiri karena telah memenuhi persyaratan suatu ilmu pengetahuan, yakni: *Pertama*, sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan kepada observasi dengan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. *Kedua*, sosiologi bersifat teoritis, ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstrak dari hasil-hasil observasi tersebut sehingga merupakan kerangka pada unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat.

Ketiga, sosiologi bersifat kumulatif yang berarti teori-teori yang sudah ada diperbaiki dan diperluas. *Keempat*, sosiologi bersifat non etnis, karena tidak mempersoalkan baik buruk fakta melainkan hanya memperjelas fakta. Sosiologi dalam kehidupan masyarakat dapat diartikan sebagai ilmu atau kelompok pengetahuan yang sistematis tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya serta proses pembudayaannya.

B. Sejarah dan Perkembangan Sosiologi

Pada tahun 1842: Istilah Sosiologi sebagai cabang Ilmu Sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis, bernama August Comte tahun 1842 dan kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat lahir di Eropa karena ilmuwan Eropa pada abad ke-19 mulai menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial.

Para ilmuwan itu kemudian berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia. Comte membedakan antara sosiologi statis, dimana perhatian dipusatkan pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat dan sosiologi dinamis dimana perhatian dipusatkan tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan.

Rintisan Comte tersebut disambut hangat oleh masyarakat luas, tampak dari tampilnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. Mereka antara lain Herbert Spencer, Karl Marx, Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Max Weber, dan Pitirim Sorokin (semuanya berasal dari Eropa). Masing-masing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

berjasa besar menyumbangkan beragam pendekatan mempelajari masyarakat yang amat berguna untuk perkembangan Sosiologi.

Émile Durkheim -ilmuwan sosial Perancis- berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis. Emile memperkenalkan pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial.

Pada tahun 1876, di Inggris, Herbert Spencer mempublikasikan *Sociology* dan memperkenalkan pendekatan analogi organik, yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia, sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Karl Marx memperkenalkan pendekatan *materialisme dialektis*, yang menganggap konflik antar-kelas sosial menjadi inisiasi perubahan dan perkembangan masyarakat.

Max Weber memperkenalkan pendekatan *verstehen* (pemahaman), yang berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia. Sosiologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir belasan abad kemudian.

1. Perkembangan Awal

Para pemikir Yunani Kuno, terutama Sokrates, Plato, dan Aristoteles, beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja. Masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran tanpa ada yang bisa mencegah. Kemakmuran dan krisis dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak terelakkan. Anggapan tersebut terus dianut semasa Abad Pertengahan (abad V Masehi sampai akhir abad XIV Masehi).

Para pemikir, seperti Agustinus, Avicenna (Ibnu Sina), dan Thomas Aquinas menegaskan bahwa nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak Ilahi. Sebagai makhluk yang fana manusia tidak bisa mengetahui, apalagi menentukan apa yang akan terjadi pada masyarakat. Pertanyaan (mengapa bisa begini atau mengapa bisa begitu) dan pertanggungjawaban ilmiah (bukturnya ini atau itu) tentang perubahan masyarakat belum terpikirkan pada masa itu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Abad Pencerahan: Rintisan Kelahiran Sosiologi

Sosiologi modern berakar pada karya para pemikir Abad Pencerahan; abad XVII Masehi. Abad itu ditandai oleh beragam penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Derasnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa pengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat. Pandangan itu harus juga berciri ilmiah.

Artinya perubahan yang terjadi dalam masyarakat harus dapat dijelaskan secara masuk akal (rasional); berpedoman pada akal budi manusia. Caranya dengan menggunakan metode ilmiah. Francis Bacon dari Inggris, Rene Descartes dari Prancis, dan Wilhelm Leibnitz dari Jerman merupakan sejumlah pemikir yang menekankan pentingnya metode ilmiah untuk mengamati masyarakat.

3. Abad Revolusi: Pemicu Lahirnya Sosiologi

Perubahan pada Abad Pencerahan membawa perubahan revolusioner sepanjang abad XVIII Masehi. Perubahan itu dikatakan revolusioner karena struktur (tatanan) masyarakat lama dengan cepat berganti dengan struktur yang baru. Revolusi sosial yang paling jelas tampak dalam Revolusi Amerika, Revolusi Industri, dan Revolusi Prancis. Ketiga revolusi itu berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini wajar mengingat kawasan Asia dan Afrika ketika itu sedang menjadi daerah koloni Eropa.

Pada Revolusi Amerika, koloni Inggris di Amerika Utaraini membentuk negara republik yang demokratis. Pemerintahan jenis ini baru pertama kali muncul saat itu, ketika kebanyakan negara membentuk pemerintahan monarki. Gagasan tentang kedaulatan rakyat (rakyat yang berkuasa) dan pentingnya hak asasi manusia (semua orang bermartabat sama) telah mengubah susunan serta kedudukan orang dan kelompok dalam masyarakat.

Pada masa Revolusi Industri muncul kalangan baru dalam masyarakat, yaitu kaum kapitalis yang memiliki modal untuk membuat usaha, serta kaum bangsawan dan rohaniwan yang sebelumnya lebih berkuasa mulai disaingi kaum kapitalis yang mengendalikan ekonomi. Kemudian muncul kesadaran akan hak asasi manusia dan persamaan semua orang di hadapan hukum yang mengakibatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

terjadinya Revolusi Prancis. Pada saat itu, rakyat menggulingkan kekuasaan bangsawan yang dianggap bersenang-senang di atas penderitaan rakyat lalu membentuk pemerintahan yang lebih demokratis.

Revolusi-revolusi ini menyebabkan berbagai perubahan dan gejolak dalam masyarakat. Tatanan yang telah berusia ratusan tahun dalam masyarakat diobrak-abrik dan dijungkirbalikkan. Perubahan ini tidak jarang disertai peperangan, pemberontakan, dan kerusakan yang membawa kemiskinan dan kekacauan. Karena itulah, para ilmuwan tergugah untuk mencari cara menganalisis perubahan secara rasional dan ilmiah sehingga dapat diketahui sebab dan akibatnya. Tujuannya, agar bencana yang terjadi akibat perubahan dalam masyarakat bisa diantisipasi dan dihindari.

C. Sosiologi Masyarakat Pesisir

Sosiologi merupakan cabang sosiologi yang mempunyai objek khusus, yaitu masyarakat pesisir yang hidup dari sumber daya laut seperti nelayan, buruh, pembudidaya, dan sebagainya. Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir cenderung digolongkan pada kelompok miskin yang terdiri dari rumah tangga perikanan menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama: kemiskinan struktural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural.

Secara faktual ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan, yaitu faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah disebabkan karena fluktuasi musim tangkap ikandan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Sementara faktor non-alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan ikan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran hasil tangkapan dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Selain itu, masalah teknologi konservasi atau pengolahan yang sangat tradisional, serta dampak negatif orientasi produktivitas yang dipacu oleh kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap (revolusi biru) yang telah berlangsung sejak tiga dasawarsa terakhir (Kusnadi, 1998). Kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir sering timbul konflik-konflik yang digolongkan menjadi empat jenis konflik.

Pertama, konflik kelas, yaitu antarkelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan, seperti konflik nelayan skala besar di sekitar perairan pesisir yang sebenarnya diperuntukan bagi nelayan tradisional. Kedua, konflik orientasi yang terjadi antar nelayan yang memiliki perbedaan orientasi (jangka pendek dan panjang) dalam pemanfaatan sumber daya, seperti konflik horizontal antara nelayan yang menggunakan bom dengan nelayan lain yang alat tangkapnya ramah lingkungan.

Ketiga, konflik agraria akibat perebutan *fishing ground*. Konflik ini dapat terjadi pada nelayan antarkelas maupun nelayan dalam kelas sosial yang sama. Bahkan dapat juga terjadi antara nelayan dengan pihak bukan nelayan, seperti konflik dengan para penambang pasir dan industri pariwisata. Keempat, konflik primordial, yang menyudutkan sistem pemerintahan otonomi dan desentralisasi kelautan. Konflik identitas tersebut tidak bersifat murni, melainkan tercampur dengan konflik kelas maupun konflik orientasi yang sebenarnya kerap terjadi sebelum diterapkannya otonomi daerah.

D. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan definisi sosiologi secara etimologi dan terminologi!
2. Mengapa sosiologi dapat disebut sebagai ilmu? Sebutkan dan jelaskan alasannya!
3. Bagaimana sejarah dan perkembangan sosiologi sebagai ilmu?
4. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup sosiologi masyarakat pesisir?
5. Mengapa sosiologi masyarakat pesisir penting untuk dipelajari?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan II
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan profil wilayah pesisir.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian wilayah pesisir;
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan tipologi wilayah pesisir;
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik masyarakat pesisir.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian wilayah pesisir;
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan tipologi wilayah pesisir;
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan karakteristik masyarakat pesisir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB II

KONSEP WILAYAH PESISIR

A. Pengertian Wilayah Pesisir

Pesisir adalah tempat dimana daratan dan lautan bertemu. Bila garis pertemuan ini tidak bergerak/pindah, mendefinisikan pesisir menjadi hal yang mudah, hanya akan berarti suatu garis pada peta namun proses alami yang membentuk pesisir sangatlah dinamis, bervariasi baik dalam hal ruang maupun waktu. Jadi, garis yang menyatukan daratan dan lautan bergerak/pindah secara konstan, dengan pasang surut ombak, dan lewatnya badai, menciptakan suatu wilayah interaksi antara daratan dan lautan.

Terdapat dari bagian-bagian dari lingkungan pesisir yang jelas-jelas memiliki interaksi yang kuat antara daratan dan lautan, termasuk pesisir, rawa-rawa, bakau dan batu-batu karang; bagian-bagian lain mungkin lebih jauh dari pesisir (pedalaman atau laut bebas), namun begitu bagian-bagian tersebut memainkan peranan yang penting dalam membentuk pesisir. Salah satu yang terpenting diantaranya adalah sungaisungai yang merupakan air tawar dan endapan untuk lingkungan pesisir.

Wilayah pesisir menurut Dahuri, dkk (1996) adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas ke arah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tertinggi, dan batas ke arah laut adalah yurisdiksi wilayah propinsi atau bangsa di suatu negara. Secara fisiologi pesisir dianggap sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Brahtz (1972), Soegiarto (1976) dan Beatly (1994) dalam Direktoral Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil (2003) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia.

Ruang kawasan pesisir adalah ruang wilayah diantara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya.

Dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis hipotetik. *Pertama*, ke arah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografis (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. *Kedua*, ke arah laut meliputi daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar).

Jadi daerah pesisir merupakan merupakan wilayah yang: a) Terdiri dari komponen daratan dan komponen lautan, b) Memiliki batas-batas daratan dan lautan yang ditentukan oleh tingkat pengaruh dari daratan terhadap lautan dan lautan terhadap daratan, c) Tidak seragam dalam hal kelebaran, kedalaman atau ketinggian.

Tiga faktor yang memperlihatkan, untuk pesisir berpasir, kekuatan dari interaksi antara proses-proses dan pemanfaatan-pemanfaatan pesisir dan laut, yang disini disebut sebagai “tingkat kepesisiran”, terdapat jarak dari pesisir, dapat juga diterapkan pada lingkungan-lingkungan pesisir lainnya, seperti delta, sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pesisir/rintangan dan pesisir muara, dimana berbagai proses fisik dan biologi dari lingkungan tersebut akan menentukan “tingkat kepe-sisirannya”. Misalnya, pada pesisir delta, faktor-faktor penentu yang penting akan merupakan tingkat penetrasi air asin ke permukaan air tawar dan sistem air tanah, serta jarak ke arah laut menuju endapan teresterial.

B. Tipologi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan wilayah ini mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan secara terpadu dan bijaksana. Secara biofisik wilayah pesisir memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Secara empiris terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas (*upland*) dengan laut lepas. Perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lainlain) di lahan atas (*upland*) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara bijaksana akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.
- b. Dalam suatu kawasan pesisir, biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat keterkaitan langsung yang sangat kompleks antara proses-proses dan fungsi lingkungan dengan pengguna sumberdaya alam.
- c. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga.
- d. Baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang berujung pada kegagalan. Misalnya suatu hamparan pesisir hanya digunakan untuk satu peruntukan, seperti tambak, maka akan lebih rentan, jika hamparan tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan.

- e. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*) sehingga dalam pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya sering menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas lebih besar karena over eksploitasi pemanfaatan dan terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya. Oleh karenanya, kondisi ini seringkali menimbulkan suatu tragedi bersama (Dahuri, 2003).

C. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Orang-orang yang tinggal di kawasan pesisir disebut masyarakat pesisir, yaitu sekumpulan masyarakat yang hidup secara bersamaan, tinggal di wilayah pesisir dan membentuk serta memiliki kebudayaan yang khas yang berkaitan dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir (Satria, 2004). Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resource based*), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir atau transportasi laut.

Masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lain. Dilihat dari perspektif antropologis, kondisi ini didasarkan pada fakta sosial bahwa masyarakat pesisir mempunyai pola-pola kebudayaan yang berbeda sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan berserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat pesisir dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Satria (2004) menambahkan bahwa secara teologis, masyarakat pesisir terutama nelayan memiliki kepercayaan bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga harus ada perlakuan khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



ketika beraktifitas di laut seperti menangkap ikan agar selamat atau mendapat hasil yang melimpah.

Masyarakat pesisir mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas/unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang perikanan itu sendiri. Karena sifat dari usaha-usaha perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim dan pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir juga terpengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Beberapa sifat dan karakteristik usaha-usaha masyarakat pesisir diuraikan sebagai berikut:

1. Ketergantungan pada Kondisi Lingkungan

Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air.

Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir menjadi sangat tergantung pada kondisi lingkungan itu dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena limbah industri maupun tumpahan minyak, misalnya, dapat menggoncang sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Pencemaran di pantai Jawa beberapa waktu lalu, contohnya, telah menyebabkan produksi udang tambak anjlok secara drastis. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi yang besar terhadap kehidupan para petani tambak tersebut.

2. Ketergantungan pada Musim

Karakteristik lain yang sangat menyolok di kalangan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, adalah ketergantungan mereka pada musim. Ketergantungan pada musim ini semakin besar bagi para nelayan kecil. Pada musim penangkapan para nelayan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Kondisi ini mempunyai implikasi besar pula terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pantai secara umum dan kaum nelayan khususnya. Mereka mungkin mampu membeli barang-barang yang mahal seperti kursi-meja, lemari, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sebaliknya, pada musim paceklik pendapatan mereka menurun drastis, sehingga kehidupan mereka juga semakin buruk.

Secara umum pendapatan nelayan memang sangat berfluktuasi dari hari ke hari. Pada satu hari mungkin memperoleh tangkapan yang sangat tinggi, tapi pada hari berikutnya bisa saja “kosong”. Hasil tangkapan, dan pada gilirannya pendapatan nelayan, juga sangat dipengaruhi oleh jumlah nelayan yang beroperasi di suatu daerah penangkapan (*fishing ground*). Di daerah yang padat penduduknya seperti daerah pantai utara Jawa, misalnya, sudah terjadi kelebihan tangkap (*overfishing*). Hal ini mengakibatkan volume hasil tangkapan para nelayan menjadi semakin kecil, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan mereka. Kondisi di atas turut pula mendorong munculnya pola hubungan tertentu yang sangat umum dijumpai di kalangan nelayan dan juga petani tambak, yakni pola hubungan yang bersifat patron-klien.

Karena keadaan ekonomi yang buruk, maka para nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil, dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dari para juragan atau para pedagang pengumpul (*tauke*). Konsekuensinya, para peminjam tersebut menjadi terikat dengan pihak juragan atau pedagang. Keterikatan tersebut antara lain berupa keharusan menjual produknya kepada pedagang atau juragan tersebut. Pola hubungan yang tidak simetris ini tentu saja sangat mudah berubah menjadi alat dominansi dan eksploitasi.

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan umumnya masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

D. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan pengertian wilayah pesisir dari berbagai ahli!
2. Bagaimana tipologi wilayah pesisir?
3. Jelaskan tentang masyarakat pesisir dan karakteritiknya!



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan III
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kekayaan yang dimiliki wilayah dan masyarakat pesisir.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan potensi sumber daya alam wilayah pesisir baik yang bersifat renewable maupun non renewable;
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh wilayah pesisir;
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan potensi lain yang dimiliki oleh wilayah dan masyarakat pesisir.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan potensi sumber daya alam wilayah pesisir baik yang bersifat renewable maupun non renewable;
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh wilayah pesisir;
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan potensi lain yang dimiliki oleh wilayah dan masyarakat pesisir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB III SUMBERDAYA PESISIR

A. Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir

Secara umum, banyak potensi yang terdapat di pesisir dan kelautan yang memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Dikatakan spesifik, karena memiliki keanekaragaman biota laut (ikan dan vegetasi laut) dan potensi lainnya seperti kandungan bahan mineral. Sumberdaya pesisir dan kelautan dapat dibedakan secara biotik dan abiotik. Sumberdaya biotik merupakan sumberdaya yang bersifat biologis atau merupakan makhluk hidup. Secara biotik, sumberdaya pesisir dan kelautan adalah :

- Ikan dan Hewan Laut Lainnya

Dalam definisi Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dikatakan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebahagian hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Sumberdaya perikanan, merupakan hasil kekayaan laut yang memiliki potensi besar untuk menambah devisa Negara. Selain 24 ikan, hewan laut lainnya banyak yang dapat dimanfaatkan terutama untuk dikonsumsi, seperti kerang, cumi-cumi, lobster, dan lainnya.

Untuk setiap karakteristik wilayah pesisir memiliki sumberdaya ikan yang berbeda-beda. Sumberdaya ikan dan hewan laut lainnya banyak berada pada zona neritik atau laut dangkal dimana kondisi di zona tersebut sangat mendukung bagi kehidupan ikan dan hewan lautnya seperti ketersediaan cahaya matahari, kekuatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



arus, dan keberagaman vegetasi yang hidup sebagai suatu kesatuan ekosistem (Adisasmita, 2006).

- Tumbuhan Laut

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrient bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi bermacam biota, penahan abrasi, penahan amukan angin taufan, dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis seperti penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, dan lain-lain.

Ekosistem bakau banyak terdapat di bagian-bagaian pulau-pulau yang terlindung dan menyebar hampir disetiap kelompok pulau, seperti Karimun, Batam, Bintan, Siantan, Tambelan, Singkep/Selayar. Jenis hutan bakau yang umumnya ditemukan antara lain : *Rhizophora*, *Soneratia* dan *Avicenia*. Pengertian mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatau individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut.

Hutan mangroove adalah tipe hutan yang secara alami dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tergenang pada saat pasang naik dan bebas dari genangan pada saat pasang rendah. Ekosistem mangrove adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu habitat mangrove.

Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem subur yang terdapat di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Ekosistem ini dibentuk oleh komunitas karang dan berbagai biota laut yang berasosiasi dengan karang. Dalam hal evaluasi terhadap 25 kondisi ekosistem terumbu karang, kriteria yang dikembangkan berupa tutupan karang. Ekosistem terumbu karang dikatakan buruk apabila mempunyai karang hidup sebesar 0-24,9 %, sedang apabila tutupan karang hidup 25-49,9 %, dikatakan bagus apabila tutupan karang hidup 50-74,9 % dan dikatakan sangat bagus apabila mempunyai tutupan karang hidup > 75 % (Adisasmita, 2006).

Perairan dangkal di beberapa pulau di Indonesia mempunyai beberapa jenis rumput laut dan lamun. Tumbuhan laut yang terdiri dari kelompok lamun dan rumput laut hampir menyebar di seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kelompok pulau dan berasosiasi dengan ekosistem hutan bakau dan terumbu karang. Jenis-jenis lamun yang dijumpai di Kepulauan Riau antara lain: *Cymodocea rotundata*, *C. serrulata*, *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Holodule pinnifolia*, *H. Uninervis*, *Holophila ovalis*, *Syringodium isoetifolium* dan *Thalassodendrum ciliatum*.

Sedangkan jenis rumput laut yang banyak ditemukan di rataan terumbu karang maupun lamun antara lain kelompok algae merah (*Gelidiella*, *Hypnea*, *Gracilaria*, *Neoginiolithon*, *Lithothamnion*, *Dictyota*, *Laurencia*, *Fauche*), kelompok alga hijau (*Caulerpa*, *Halimeda*, *Cahemorpha*, *Udoea*, *Chlorodermis*, *Valonia*, *Ulva*) dan kelompok alga coklat (*Sargassum*, *Padina*, *Turbinaria*).TM

Selanjutnya adalah sumberdaya abiotik

- Air Laut

Air laut mengandung 3,5 % garam-garam, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Keberadaan garam-garaman mempengaruhi sifat fisis air laut (seperti: densitas, kompresibilitas, titik beku, dan temperatur dimana densitas menjadi maksimum) beberapa tingkat, tetapi tidak menentukannya. Beberapa sifat (viskositas, daya serap cahaya) tidak terpengaruh secara signifikan oleh salinitas. Dua sifat yang sangat ditentukan oleh jumlah garam di laut (salinitas) adalah daya hantar listrik (konduktivitas) dan tekanan osmosis.

Garam-garaman utama yang terdapat dalam air laut adalah klorida (55 %), natrium (31 %), sulfat (8 %), magnesium (4 %), kalsium (1 %), potassium (1 %) dan sisanya (kurang dari 1 %) terdiri dari bikarbonat, bromide, asam borak, strontium dan 26 florida. Tiga sumber utama garam-garaman di laut adalah pelapukan batuan di darat, gas-gas vulkanik dan sirkulasi lubang-lubang hidrotermal (*Hydrothermal vents*) di laut dalam.

Secara ideal, salinitas merupakan jumlah dari seluruh garam-garaman dalam gram pada setiap kilogram air laut, oleh karena itu penentuan harga salinitas dilakukan dengan meninjau komponen yang terpenting saja yaitu klorida (Cl). Kandungan klorida pada satu kilogram air laut jika semua halogen digantikan oleh klorida. Penetapan ini mencerminkan proses kimiawi titrasi untuk menentukan kandunganklorida.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Angin Laut

Angin ini terjadi di daerah pantai yang diakibatkan adanya perbedaan sifat daratan dan lautan. Pada malam hari daratan lebih dingin daripada lautan sehingga di daratan merupakan daerah maksimum yang menyebabkan terjadinya angin darat. Sebaliknya, pada siang hari terjadi angin laut.

- Gelombang Laut

Gelombang selalu menimbulkan sebuah ayunan air yang bergerak tanpa hentihentinya pada permukaan air laut dan jarang dalam sama sekali diam. Secara teori, pengertian gelombang laut (ideal) adalah pergerakan naik turunnya muka air laut yang membentuk lembah dan bukit mengikuti gerak sinusoidal. Penyebab terjadi gelombang laut dipengaruhi beberapa faktor berikut : 1. Kecepatan angin, 2. Lama anginnya bertiup dan luas daerah yang terkena pengaruh, 3. Kedalaman air laut, 4. Adanya getaran kulit bumi di dasar laut, 5. Tetapi faktor utamanya karena angin dan gempa.

- Minyak Laut

Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme, sehingga disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan dan hewan yang mati sekitar 150 juta tahun yang lampau.

Sisa-sisa organism itu mengendap di dasar lautan yang kemudian ditutupi oleh lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh suhu dan tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik itu dan mengubahnya menjadi minyak dan gas.

Proses pembentukan minyak dan gas ini memakan waktu jutaan tahun. Minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori bagaikan air dalam batu karang. Minyak dan gas dapat pula bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian terkonsentrasi jika terhalang oleh lapisan yang kedap. Walaupun minyak bumi dan gas alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas yang terdapat di daratan. Hal ini terjadi karena pergerakan kulit bumi, sehingga sebagian lautan menjadi daratan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



B. Sumberdaya Manusia Masyarakat Pesisir

Perkembangan masyarakat pesisir di Indonesia hingga saat ini masih belum sebagus masyarakat yang tinggal di daratan atau bahkan perkotaan. Hal itu bisa terlihat dengan belum tercukupinya fasilitas yang menunjang perkembangan sumberdaya manusia di wilayah pesisir.

Fakta tersebut cukup memprihatinkan, mengingat masyarakat di kawasan tersebut selama ini dikenal sangat dekat dengan sumber daya hayati yang ada di laut. Namun, potensi kelautan dan perikanan yang selama ini ada, ternyata masih belum bisa menyejahterakan masyarakat di kawasan pesisir yang meliputi pulau-pulau terdepan di Indonesia.

Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan (*demand*) atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu masyarakat/organisasi merupakan kebutuhan yang sangat utama. Kebutuhan sumber daya ini bukan sekedar kuantitas melainkan kualitas yang baik, dalam masyarakat pesisir kualitas sumber dayamanusia bisa dikatakan cukup kurang. Hal ini diakibatkan beberapa factor internal dan eksternal. Berikut beberapa faktor yang menjadi tolak ukur peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir, yaitu:

1. Eksternal

- a. Ekonomi
- b. Sosial Politik dan Budaya
- c. Hukum dan Peraturan
- d. Perkembangan Ilmu dan Teknologi
- e. Persaingan antara Masyarakat

2. Internal

- a. Perencanaan yang belum jelas dari sebuah individu dan kelompok
- b. Perluasan Usaha dan keterampilan yang minim.

Oleh karena itu, sumberdaya manusia merupakan tujuan penting dalam pengembangan suatu masyarakat. Sumberdaya manusia berperan dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan beberapa potensi di wilayah pesisir. Sumberdaya manusia yang baik ialah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

bisa memberikan kebermanfaat untuk lingkungan sekitar bukan menjadi beban seperti banyaknya pengangguran yang mengakibatkan masalah sosial.

C. Potensi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa (UU RI No. 27 Tahun 2007). Pada dasarnya wilayah pesisir tersusun dari berbagai ekosistem, seperti mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir, dan lainnya, yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri.

Dalam UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa potensi di kawasan pesisir sangatlah besar, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi buatan. Potensi sumberdaya kawasan pesisir menurut UU ini yaitu sumberdaya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain), sumberdaya nonhayati (pasir, air laut, mineral dasar laut), sumberdaya buatan (infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

D. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan definisi sumberdaya alam wilayah pesisir!
2. Jelaskan apa saja sumberdaya alam wilayah pesisir?
3. Mengapa sosiologi masyarakat pesisir harus memahami sumberdaya manusia? Sebutkan dan jelaskan!
4. Apa saja potensi di wilayah pesisir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan IV
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan aspek struktural masyarakat pesisir.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari struktural masyarakat pesisir
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan dimensi pelapisan sosial masyarakat pesisir.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan diferensiasi masyarakat pesisir
- d. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dalam stratifikasi sosial.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian struktural masyarakat pesisir.
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan dimensi pelapisan sosial.
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan diferensiasi masyarakat pesisir.
- d. Mahasiswa telah mampu menjelaskan teori-teori dalam stratifikasi sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB IV

ASPEK STRUKTURAL MASYARAKAT PESISIR

A. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial biasa disebut sebagai lapisan/pengelompokan masyarakat dalam kategori kelas sosial. Kata stratifikasi berasal dari bahasa latin yaitu “stratum” yang artinya tingkatan. Tetapi dalam dunia akademik mahasiswa harus bisa memahami antara ketidaksamaan sosial (*social inequality*) dengan stratifikasi sosial (*social stratification*). Hal ini melahirkan definisi terkait perbedaan tersebut. *Pertama*, ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan antar individu dalam pengaruh sosial, yakni aksi seorang individu akan diikuti atau ditiru oleh individu lainnyadalam ruang/situasi lingkungan sosial tertentu. Jadi ketidaksamaan berbeda dengan stratifikasi yang lebih menekankan kepada derajat kekuasaan dan kekayaan. *Kedua*, ketidaksamaan sosial mengimpilkasikan ketidaksamaan antar individu, bukan suatu antar kelompok-kelompok yang belainan. Apabila terjadi ketidaksamaan, individu mendapatkan kedudukan yang berbeda tetapi mereka tetap sebagai individu.

Stratifikasi sosial membentuk dua kelompok atau lebih kelompok-kelompok yang bertingkat yang disebut sebagai (*rangked group*) dalam satu masyarakat tertentu, yang anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestise yang tidak sama. Menurut Fried (1967) masyarakat terstratifikasi adalah masyarakat di mana anggota yang berjenis kelamin dan umurnya tidak mendapat pendapatan atau penghasilan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Menurut Soekanto (2013), stratifikasi/lapisan masyarakat memiliki tiga macam kelas, yaitu ekonomis, politis dan yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat, dalam masyarakat pesisir lebih di kenal dengan sebutan pemilik dan buruh atau bersifat patron-klien.

Perbedaan dalam hak-hak istimewa juga merupakan bagian dari system stratifikasi, dan biasanya dalam masyarakat tersratifikasi ketidaksamaan prestise/kedudukan berasal dari ketidaksamaan kekuasaan dan hak-hak istimewa. Karakteristik penting lain dari stratifikasi adalah ia melibatkan kelompok bukan individu. Para sosiolog mempunyai kategori kelas, Weber berpendapat bahwa stratifikasi terjadi akibat perjuangan ekonomi dan kedudukan sosial sama halnya dengan Kurt B. Mayer yang mengatakan bahwa unsur ekonomi sebagai lapisan yang sangat berpengaruh dalam masyarakat.

Dalam masyarakat pesisir Indonesia, Stratifikasi membentuk struktur kelas sosial dengan “struktur empat kelas” keempat kelas tersebut adalah:

1. Buruh Nelayan
2. Nelayan Kecil (memperkerjakan 1-3 orang buruh)
3. Nelayan Menengah (memperkerjakan 4-10 orang buruh)
4. Nelayan Besar atau disebut dengan kapitalis (memperkerjakan lebih dari 10 orang buruh)

Persamaan dan perbedaan ini belum menjadi patokan khusus, karena faktor teknologi, modal dan biaya operasional maupun ukuran perahu menentukan bentuk stratifikasi sosialnya. Barber dalam “*Social Stratification: Structur and trends mobility in western society*”, mengemukakan enam dimensi dari stratifikasi sosial. Pertama, adalah prestise jabatan atau pekerjaan (*accupational prestige*); kedua, rangking dalam wewenang dan kekuasaan (*authority and power rangkings*); ketiga, pendapatan atau kekayaan (*incomeor wealth*); keempat, pendidikan atau pengetahuan (*education or knowledge*); kelima, kesucian beragama atau pimpinan keagamaan (*religious or ritual purity*); dan keenam, kedudukan dalam kerabatan dan kedudukan dalam suku-suku bangsa (*khimship and ethnic group rangkings*).

Sementara itu, istilah kelas sebenarnya lebih sempit dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

stratifikasi sosial. Istilah kelas lebih merujuk pada suatu lapisan atau suatu strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Kelas sosial, dengan demikian cenderung di artikan sebagai kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi politik, nilai, budaya, sikap, dan perilaku sosial yang secara umum sama. Masyarakat kelas menengah ke atas, misalnya, dalam banyak hal memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat miskin, bukan hanya dalam hal penampilan fisik mereka, seperti cara berpakaian dan sarana transportasi yang dipergunakan, atau bahkan mereknnya. Tetapi antar mereka berbeda idiologi politik, nilai yang dianut, sikap, dan perilaku sehari-harinya. Secara sederhana, perbedaan kelas sosial bisa di lihat dari perbedaan besar penghasilan rata-rata seorang setiap hari atau setiap bulanya. Namun, seperti yang dikatakan Paul B. Horton dan Chester L. Hunt bahwa terbentuknya stratifikasi dan kelas-kelas sosial di dalamnya sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan uang stratifikasi sosial adalah suatu strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum atau rangkaian kesatuan status sosial.

Stratifikasi sosial juga berpengaruh terhadap pola tindakan sosial, artinya individu atau kelompok lapisan atas bersikap dan berperilaku tertentu acap kali berbeda dengan individu atau kelompok yang berada pada lapis dibawahnya. Stratifikasi sosial juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap arah dan bentuk interaksi sosial serta perkembangan institusi sosial. Bentuk interaksi sosial dan perkembangan institusi sosial dalam kehidupan masyarakat pesisir bisa dilihat dengan lapisan atas dan lapisan bawah, yang biasa disebut dengan Patron dan Klien. Keberadaan stratifikasi sosial telah memberikan orang-orang tertentu menempati puncak strata dan terus mengontrol sumber-sumber ekonomi. Mereka bisa terus mengontrol dan menguasai kehidupan buruh nelayan dengan cara mengikat sumber-sumber penghasilan, bahkan sumber politik dan akan memperoleh perlakuan istimewa.

Bentuk stratifikasi sosial yang melestarikan kesenjangan sosial adalah perbudakan (*slavery*), seperti ditemukan oleh negara Yunani, Amerika Serikat dan Amerika Latin. Dalam sistem perbudakan, seorang budak adalah milik majikan. Kedudukan budak sangat rendah dan sering kali diperlakukan seperti barang yang bisa dijual beli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sebaliknya, seorang budak yang tidak mampu bekerja keras memiliki nilai yang rendah.

Bentuk lain stratifikasi sosial adalah kasta. Kasta adalah system strata yang diwariskan terutama melalui keyakinan agama. Oleh karena itu, system strata ini keyakinan agama, maka relative permanen atau tidak berubah. Di India system kasta dengan empat tingkatan yang berjenjang.

Bentuk lain dari stratifikasi sosial adalah kelas sosial (*social class*). System kelas adalah pelapisan berdasarkan posisi ekonomi dalam masyarakat, sifat ini tidak permanen, kapan saja dan dimana saja, kelas sosial seseorang melalui kasta ekonomi akan naik ke strata yang lebih tinggi.

Ahli Sosiologi berbeda pendapat soal stratifikasi sosial, paham fungsionalisme berbeda dengan para pengikut teori konflik. Perbedaan eksplanasi itu terjadi karena mereka beranggapan bahwa asumsi dasar sangat berbeda, paham fungsionalisme percaya bahwa stratifikasi sosial tidak bisa dipisahkan oleh struktur masyarakat, masyarakat akan pincang tanpa adanya stratifikasi sosial. Sedangkan paham teori konflik dalam menerangkan stratifikasi sosial. Teori konflik lahir dari prinsip-prinsip Karl Marx. Menurut Teori ini mengemukakan sejarah umat manusia diwarnai oleh perjalanan panjang tentang penindasan kelompok yang kuat (*the opperssors*) terhadap kelompok yang lemah (*the oppresses*). Penindasan itu baru bisa berhenti ketika masyarakat tidak mengenal kelas lagi. Dalam kapitalisme masyarakat pesisir, kelas yang dominan terus menerus melakukan manipulasi system ekonomi dan system politik agar selalu dapat mengontrol kelompok ploretar. Kesenjangan sosial dan penindasan adalah inherent dalam kapitalisme.

Ahli teori konflik percaya bahwa anggota masyarakat setiap saat bisa melakukan konflik akibat dari kesenjangan kekayaan, status dan kekuasaan. Itu berarti bahwa konflik terjadi bukan hanya pada perjuangan kelas, tetapi bersumber dari perjuangan ras, politik maupun agama. Dalam kehidupan masyarakat pesisir, kelompok terkuat atau *powerfull* memiliki kekuasaan dibidang produksi seperti kepemilikan kapal/perahu dan toko-toko hasil tangkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



para nelayan, kelompok terlemah yaitu para nelayan yang belum bisa lepas dari jeratan.

Dalam sosiologi juga dibahas masalah hubungan patron-client. Istilah Patron berasal dari bahasa Spanyol yang berarti seseorang yang mempunyai kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh. Patron adalah seorang figure yang berkedudukan sebagai kepala, majikan atau pelindung terhadap klien (orang yang berkedudukan sebagai anak buah, buruh atau yang dilindungi). Patron melindungi atau menjaga klien, bahkan memberikan sebagian penghasilan yang diperolehnya. Kemudian sebagai imbalannya, patron memperoleh loyalitas, dukungan politik serta jasa-jasa lain yang mengikat dan semakin memperkuat posisi patron.

Dalam hubungan patron-client menghasilkan hubungan timbal balik yang bersifat *reciprocal*, yang saling menguntungkan (Plamen, 2008). Hubungan timbal balik ini bersifat formal, terlembagakan dalam bentuk perjanjian, kontrak atau kesepakatan. Akan tetapi ada yang bersifat informal yaitu melalui nilai-nilai tertentu, dalam masyarakat pesisir sifat informal ini sangat mempengaruhi hubungan patron-client karena hubungan informal ini bersifat saling membutuhkan karena nelayan sebagai client membutuhkan patron untuk melanjutkan hidup dengan cara meminjam uang.

Meskipun hubungan patron-client sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sebenarnya mencuat ke permukaan bersamaan dengan tumbuhnya feodalisme yang muncul di Eropa Barat dan di kalangan masyarakat Jepang. Bersamaan tumbuhnya feodalisme, hubungan yang melembagakan proteksi personal serta subordinasi antara tuan dan buruh telah menjadi basis organisasi sosial dan politik.

B. Dimensi Pelapisan Sosial

Lapisan dalam masyarakat pesisir bisa dilihat dari yang terendah dan tertinggi. Hal ini bersifat kumulatif, bagaimana pemilik modal mempunyai uang dan keuntungan yang banyak dari buruh nelayan. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat kedalam suatu lapisan sebagai berikut:

1. Ukuran kekayaan
2. Ukuran kekuasaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

3. Ukuran kehormatan
4. Ukuran ilmu pengetahuan

Ukuran diatas tidak bersifat paten, karena dengan seiringnya waktu ada perubahan sosial dan struktur yang mempengaruhi stratifikasi sosial.

Terjadinya stratifikasi sosial atau sistem pelapisan dalam masyarakat cenderung bisa dibedakan dengan dua indikator, yaitu system pelapisan karena terjadi dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

C. Diferensiasi Sosial

Diferensiasi sosial yang sangat menonjol pada masyarakat nelayan dan petani tambak adalah diferensiasi yang berdasarkan penguasaan alat produksi. Pada masyarakat nelayan, umumnya terdapat tiga diferensiasi kelompok.

Pertama dan yang paling atas adalah mereka yang memiliki kapal motor lengkap dengan alat tangkapnya. Mereka ini biasanya dikenal dengan nelayan besar atau modern. Biasanya mereka tidak ikut melaut. Operasi penangkapan diserahkan kepada orang lain, buruh atau tenaga kerja yang digunakan cukup banyak, bisa sampai dua atau tiga puluhan.

Kedua adalah mereka yang memiliki perahu dengan motor tempel. Pada strata ini biasanya pemilik tersebut ikut melaut memimpin kegiatan penangkapan. Buruh yang ikut mungkin ada tapi terbatas dan seringkali merupakan anggota keluarga saja.

Ketiga adalah buruh nelayan. Meskipun para nelayan kecil bisa juga merangkap menjadi buruh, tetapi banyak pula buruh ini yang tidak memiliki sarana produksi apa-apa, hanya tenaga mereka itu sendiri.

Seringkali nelayan besar juga merangkap sebagai pedagang pengumpul. Namun demikian, biasanya ada pula pedagang pengumpul yang bukan nelayan, sehingga pedagang ini merupakan kelas tersendiri. Mereka biasanya menempati posisi yang dominan ketika berhadapan dengan para nelayan kecil. Dalam masyarakat petani tambak, diferensiasi sosial berdasarkan penguasaan alat produksi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



juga menonjol. Mirip dengan strata sosial yang ada pada masyarakat nelayan, masyarakat petani tambak juga terdiri dari tiga diferensiasi secara vertikal yang dominan, yaitu:

- (1) Diferensiasi atas adalah mereka yang menguasai tambak yang luas,
- (2) Diferensiasi menengah yang memiliki luas tambak sedang/kecil, dan
- (3) Diferensiasi paling bawah adalah para pengelola/buruh.

Bagi para nelayan, penguasaan alat produksi tadi sangat berhubungan dengan daya jelajah mereka dalam melakukan penangkapan. Mereka yang beroperasi dengan menggunakan kapal motor, misalnya, dapat melakukan penangkapan dan sekaligus pemasaran di daerah-daerah yang sangat jauh. Sementara nelayan kecil yang menggunakan perahu tanpa motor hanya mampu beroperasi di daerah yang dekat atau daerah pantai/pesisir saja. Sifat usaha penangkapan juga menyebabkan munculnya pola tertentu dalam hal kebersamaan antar anggota keluarga nelayan. Bagi para nelayan kecil, misalnya, seringkali mereka berangkat sore hari kemudian kembali besok harinya. Ada juga yang berangkat pagi-pagi sekali, kemudian kembali pada sore atau malam harinya. Sementara mereka yang beroperasi dengan kapal motor bisa meninggalkan rumah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan pada masyarakat pantai adalah aktivitas kaum wanita dan anak-anak. Pada masyarakat ini, umumnya wanita dan anak-anak ikut bekerja mencari nafkah. Kaum wanita (orang tua maupun anak-anak) seringkali bekerja sebagai pedagang ikan (pengencer), baik pengencer ikan segar maupun ikan olahan. Mereka juga melakukan pengolahan ikan, baik kecil-kecilan di rumah untuk dijual sendiri maupun sebagai buruh pada pengusaha pengolahan ikan. Sementara itu, anak laki-laki seringkali sudah dilibatkan dalam kegiatan melaut. Ini antara lain yang menyebabkan anak-anak nelayan banyak yang tidak sekolah.

D. Teori-Teori dalam Stratifikasi Sosial

1. Teori Max Weber

Weber dalam dasar pemikirannya menyatakan bahwa kelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



menengah kebawah dianggap memiliki peranan strategis dalam sejarah agama Kristen. Weber menyimpulkan bahwa kelas-kelas yang secara ekonomi tidak mampu, seperti para budak dan buru harian, tidak akan pernah bertindak sebagai pembawa panji. Hal ini bisa dilihat dalam peran buruh di masyarakat pesisir, buruh tidak akan bisa naik tingkat atau memegang kekuasaan kapal dalam melaut.

Menurut Weber, stratifikasi sosial merupakan faktor yang menentukan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial, dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis di baginya lagi dalam kelas yang bersandarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakannya stand.

2. Teori Evolusioner-Fungsionalis

Teori ini dikemukakan oleh ahli sosiologi Talcott Parson. Parson beranggapan bahwa evolusi sosial secara umum terjadi karena sifat kecenderungan masyarakat untuk berkembang, yang disebutkan sebagai “kapasitas adaptif”. Kapasitas adaptif adalah kemampuan masyarakat untuk merespon lingkungan dan mengatasi berbagai masalah yang selalu dihadapi manusia sebagai makhluk sosial.

Jadi, masyarakat kontemporer memiliki kapasitas adaptifnya yang semakin efisien dibanding masa sebelumnya. Parsons beranggapan bahwa timbulnya stratifikasi sebagai aspek penting dari evolusi akibat meningkatkan kapasitas adaptif dalam kehidupan sosialnya. Stratifikasi berperan penting bagi parsons, karena mengakibatkan masyarakat dapat mengatasi keterbasan-keterbasan mereka. Jika setiap orang diperlakukan sama dan mempunyai derajat yang sama maka pembagian kerja tidak terjadi dan kepemimpinan tidak akan menjadi hal yang sangat berpengaruh.

3. Teori Surplus

Sosiolog Gerhard Lenski (1966) berpendapat dan memberikan sudut pandang yang berbeda tentang stratifikasi, teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Surplus berorientasi materialistik dan berdasarkan teori konflik, teori ini berlawanan dengan parsons. Lenski berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang mementingkan diri sendiri dan selalu berusaha untuk mensejahterakan dirinya. Individu berperilaku menurut kepentingan pribadi, bekerja sama dengan individu lain jika terkait dengan kepentingannya, dan akan berebut dengan sesama jika melihat kesempatan terbuka bagi kepentingannya. Teori ini berasumsi bahwa individu tidak akan pernah puas dan individu mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mencapai keinginannya tersebut.

Surplus produksi ekonomi yang mempengaruhi dan menyebabkan perkembangan stratifikasi, semakin besar surplus, semakin besar pula stratifikasi yang terjadi. Menurut Lenski, besarnya surplus ditentukan oleh kemampuan teknologi masyarakat. Dengan demikian adanya hubungan antara derajat perkembangan teknologi dengan derajat stratifikasi. Teori tersebut ditampilkan pada gambar berikut.



4. Teori Kelangkaan

Teori kelangkaan (*scarcity theory*) merupakan deviasi pemikiran tiga tokoh Sosiologi, Harner (1970), Morton Fried (1967) dan Rae Lesser Blumberg (1978). Teori ini berasumsi bahwa penyebab utama timbul dan semakin intens stratifikasi disebabkan oleh tekanan jumlah penduduk dan semakin sempit lapangan pekerjaan. Penting untuk diketahui bahwa teori surplus dan teori kelangkaan mempunyai beberapa kesamaan.

Keduanya berorientasi konflik-materialistik, yang sangat berbeda dengan interpretasi evolusioner-fungsionalis. Tetapi jika teori surplus beranggapan kemajuan teknologi sebagai sebab dari berkembangnya stratifikasi, maka teori kelangkaan beranggapan hubungan kausal antara teknologi dan stratifikasi adalah menyesatkan. Teori kelangkaan beranggapan bahwa kedua hal tersebut diakibatkan oleh tekanan penduduk. Teori kelangkaan dalam hal ini unggul, karena teori surplus bertentangan dengan interpretasi nyata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

E. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan pengertian stratifikasi sosial?
2. Jelaskan perbedaan ketidaksamaan sosial dengan stratifikasi sosial?
3. Sebutkan bentuk stratifikasi sosial di masyarakat pesisir?
4. Sebutkan dan jelaskan teori-teori dalam stratifikasi dan bagaimana anda memahaminya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan V
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan ekonomi masyarakat pesisir.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengelolaan ekonomi masyarakat pesisir.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi masyarakat pesisir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB V

EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

A. Pengertian Ekonomi Masyarakat Pesisir

Ekonomi masyarakat pesisir merupakan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pengaturan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (2010:164-165) menyatakan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak ini dikhawatirkan akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dikuasai oleh pemodal besar, sehingga nelayan tradisional yang telah menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Menurut Mahkamah Konstitusi, salah satu tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan.

Dalam pengusahaan perairan pesisir, menurut Suseno (2008: 27-8) terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek sosial, perikanan, jasa-jasa lingkungan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam proses pembangunan adalah prinsip yang senantiasa harus menjadi dasar utama bagi seluruh stakeholder.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Secara umum prinsip pengelolaan sumber daya meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Prinsip kehati-hatian. Hal ini termasuk dalam *Code of Conduct for Responsible Nature 1995*, yang menyebutkan negara harus memberlakukan pendekatan yang bersifat kehati-hatian secara luas demi konservasi, pengelolaan, dan pengusahaan sumber daya hayati guna melindungi dan mengawetkan lingkungannya,
- 2) Prinsip tanggung jawab, pengelolaan yang bertanggung jawab tidak memperbolehkan hasil tangkapan melebihi jumlah potensi lestari yang boleh ditangkap,
- 3) Prinsip keterpaduan, yaitu keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya,
- 4) Prinsip berkelanjutan, yaitu konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan komponen ekologi, ekonomi dan sosial.

B. Pengelolaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Setiap komponen itu saling berhubungan dalam satu sistem yang dipicu kekuatan dan tujuan. Alasan pentingnya tujuan pengelolaan ekonomi pesisir bahwa ekonomi ekologi meneliti hubungan antara ekosistem, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Hal ini bisa dibidang salah satu daerah yang paling cepat berkembang dalam bidang ekonomi. Sweden et al (2008) menyatakan pemahaman ekonomi pesisir memberikan kontribusi ekonomi penting dari ekosistem untuk perekonomian karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Pertama, ekosistem pesisir yang sangat produktif dan memberikan kontribusi sejumlah besar nilai ekonomi terhadap perekonomian pesisir.
- 2) Kedua, semua negara pada umumnya, dan ekonomi pesisir khususnya, memiliki sistem yang kompleks dari kepemilikan, pasar, organisasi produktif, dan pemerintah yang menentukan siapa yang menerima manfaat ekonomi dan yang membayar biaya produksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sarana dan prasarana ekonomi di lingkungan masyarakat, baik di Ibu Kota Kabupaten maupun di Ibu Kota Kecamatan termasuk Ibu Kota Desa, mendukung dan mendorong perekonomian. Antara lain sarana dan prasarana infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan perekonomian baik dan lancar dengan fasilitas yang sudah memadai, komunikasi lancar dan merata. Kenyataan yang ada di Wilayah Pesisir Provinsi Riau sebagai contoh Kecamatan Tebing Tinggi Timur dalam hal perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sarana Perekonomian Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Desa	Pasar	Kope rasi	Kios/ Warung	Toko /Kedai	Kilang Sagu	Pabrik
Lukun	-	1	4	16	5	-
Batu Suir	-				-	-
Sungai TohorBarat	-		7	9	-	-
Sungai Tohor	-	1	-	16	14	-
Nipah Sendanu	1		45	-	-	-
Sendanu Darul Ikhsan	-		10	7	-	-
Tanjung Sari	-		12	7	-	-
Tanjung Gadai	2		17	39	-	-
Teluk Buntal	-	1	6	28	1	-
Kepau Baru	2	-	7	20	2	1
Kecamatan	5	3	77	142	20	1

Sumber: Profil Kecamatan 2016

Terlihat pada tabel diatas sarana ekonomi di Wilayah Pesisir Kecamatan Tebing Tinggi Timur bervariasi terutama di Desa Kepau Baru. Semua sektor telah ada, dan yang paling dominan Rumah Burung sejumlah 36 Unit, Toko/Kedai sejumlah 20 Unit, Kilang Sagu 2 Unit, dan pabrik Sagu 1.

Dari hasil informasi PT Sempurna, hampir tidak operasi seperti biasanya, Buruh dalam satu bulan hanya 8 hari kerja. Rata-rata sebagai buruh untuk menebang pohon Sagu adalah Suku Akit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

C. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi masyarakat pesisir?
2. Jelaskan dan analisis prinsip pengelolaan sumberdaya ekonomi pesisir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan VI
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan kekayaan masyarakat pesisir.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan kekayaan sumber daya alam masyarakat pesisir.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan kekayaan sumber daya manusia.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana mengelola SDA dan SDM untuk kemajuan masyarakat pesisir.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan kekayaan sumber daya alam masyarakat pesisir.
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan kekayaan sumber daya manusia masyarakat pesisir.
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan mengelola SDA dan SDM untuk kemajuan masyarakat pesisir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB VI

KEKAYAAN MASYARAKAT PESISIR

A. Kekayaan Sumberdaya Alam

Sejarah pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah ada sejak zaman nenek moyang mulai memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk menunjang kehidupan mereka. Sebelum era dunia modern pengelolaan sumberdaya alam masih bersifat lokal, dimana struktur masyarakat dan aktivitasnya masih sederhana.

Menurut Yudi (2015), beberapa ciri dari pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional antara lain adalah:

- (1) Pengelolaan sumberdaya alam cenderung berkelanjutan
- (2) Struktur pihak yang terlibat masih sederhana
- (3) Bentuk pemanfaatannya terbatas dan termasuk skala kecil
- (4) Tipe masyarakat dan kegiatannya relatif homogen
- (5) Komponen pengelolaannya (manajemen) berasal dan berakar pada masyarakat
- (6) Rasa kepemilikan dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam tinggi
- (7) Rasa untuk melindungi dan menjaga juga tinggi.

Aturan-aturan yang digunakan umumnya timbul dan berakar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Aturan-aturan dan kebijakan ini kemudian ditetapkan, dikukuhkan dan disepakati bersama oleh masyarakat sebagai suatu undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

undang atau hukum yang lebih dikenal sebagai hukum adat. Dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut juga langsung diaplikasikan oleh masyarakat dan masyarakat juga yang akan melakukan pengawasan dan evaluasinya.

Sistem pengelolaan di atas dapat berjalan dengan baik di dalam struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama. Hal yang sangat menunjang efektifitas pelaksanaan dan pengawasan dari hukum-hukum tersebut, dikarenakan adanya rasa memiliki dan ketergantungan dari masyarakat akan keberadaan sumberdaya alam yang ada dalam menunjang kehidupan mereka.

Keadaan ini dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari. Masyarakat yang strukturnya masih sederhana (belum banyak dicampuri oleh pihak luar) memiliki sistem pengelolaan yang berakar pada masyarakat (*community based management*), di mana setiap proses-proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada penerapan sanksi hukum, dilakukan secara bersama oleh masyarakat.

Konsekuensinya, segala aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama cenderung dapat dilakukan dan ditaati dengan sepenuh hati. Di samping itu, setiap anggota masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dari aturan-aturan tersebut.

Sumberdaya alam merupakan anugerah dan kekayaan yang diberikan oleh sang pencipta. Sumber daya alam masyarakat pesisir di Provinsi Riau merupakan salah satu komoditas unggulan terutama sektor perikanan. Kondisi geografis Provinsi Riau dimana 17,40% dari total luas wilayahnya merupakan daerah lautan serta terdapat 15 sungai menjadikan sektor perikanan berkembang dengan baik. Selain itu masih luasnya lahan yang belum dimanfaatkan merupakan potensi besar untuk budidaya perikanan darat untuk berkembang. Selain itu, permintaan pasar terhadap produk perikanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

semakin meningkat menjadikan sektor penangkapan saja tidak cukup sehingga kegiatan budidaya ikan seperti keramba, kolam, perikanan umum dan tambak berkembang dengan baik.

Produksi perikanan Provinsi Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Pada tahun 2015, data menunjukkan bahwa hasil tangkapan perikanan laut sebesar 106.233,1 ton atau menurun 1 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah rumah tangga perikanan menurun hingga 14.610 KK atau meningkat 0,98 persen. Selain itu, terjadi juga penurunan pada jumlah kapal penangkap ikan sebanyak 123 unit.

Industri pengolahan hasil perikanan darat dapat dibagi dalam empat jenis, yaitu karamba, kolam, perikanan umum dan tambak. Pada tahun 2015, produksi ikan karamba adalah 5.378,56 ton atau menurun sebesar 82,52 persen. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah karamba yaitu sebanyak 157.638 unit. Hasil produksi ikan pada perikanan umum juga mengalami penurunan sebesar 3,9 persen akibat menurunnya jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 123 RTP.

B. Kekayaan Sumberdaya Manusia

Potensi bagian dari kekayaan sumberdaya manusia. Hal ini menjadi modal yang paling utama untuk dapat mengembangkan dari sumberdaya alam yang ada pada lingkungan sekitarnya. Karena SDM dan SDA merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian Siti (2016), potensi sumberdaya manusia bisa dilihat dari perilaku seperti keterampilan diantaranya:

1. Keterampilan

Merupakan sebuah aktivitas atau kreasi warga sesuai dengan potensi alam untuk mempertahankan kehidupan. Ketemapilan yang ada seperti anyam menganyam itu khas dari Suku Asli yang ada di Desa Kepau. Selain dari menganyam atap dari Rumbia, warga ada yang membuat alat tangkap ikan untuk di sungai maupun laut. Untuk penambahan penghasilan dalam rumah tangganya, warga tersebut pengumpul Pohon Bakau. Seluruh aktivitas warga dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 1. Kerajinan dari bambu



Gambar 2. Atap dari Rumbia



Gambar 3. Buah Pinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Kesenian

Kesenian merupakan dari budaya, dan sarana yang digunakan sebagai hasil dari ekspresi tentang keindahan, hasil dari jiwa manusia. Kesenian merupakan sebagai sarana dan juga memiliki fungsi lain, seperti mitos, berguna untuk menentukan norma norma yang ada di Suku Akit di Parit 1. Hal ini termasuk sebagai adat istiadat, khusus untuk mengikat pada tingkat solidaritas. Kenyataan di Parit 1, mitos masih ada di suku tersebut, hanya bentuk kesenian yang terkait dengan masalah tarian, dan hal-hal ekspresi tersebut tidak terlihat. Dengan adanya kreasi, anyam menganyam, serra membuat peralatan yang dilakukan warga itu sudah termasuk pada tataran seni.

Pemahaman kesenian bagi masyarakat pesisir ternyata yang dikatakan kesenian adalah yang berhubungan dengan tarian-tarian dan pencak silat. Hal ini tidak terlalu diperhatikan dikarenakan memerlukan peralatan sesuai dengan yang seharusnya. Yang mereka lakukan adalah hanya joged dan pencak silat sebagai untuk pergaulan di lingkungan sekitar dan sebagai untuk bela diri.

C. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan definisi kekayaan sumberdaya alam?
2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pengelolaan SDA secara tradisional?
3. Apa saja kekayaan sumberdaya manusia masyarakat pesisir?
4. Mengapa sosiologi harus mempelajari pengelolaan SDA dan SDM di masyarakat pesisir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan VII
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan interaksi & konflik.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari interaksi sosial
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian konflik
- d. Mahasiswa mampu menjelaskan terjadinya konflik di masyarakat pesisir dan bagaimana resolusinya.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial.
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya konflik.
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian konflik
- d. Mahasiswa telah mampu menjelaskan apa saja faktor terjadinya konflik dan bagaimana resolusinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB VII

INTERAKSI DAN KONFLIK

A. Pengertian Interaksi

Interaksi sosial bagian inti dari proses sosial, karena interaksi bagian utama dari aktivitas-aktivitas sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok. Menurut Soekanto (2013), apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu, mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau mungkin saling berkelahi. Thibaut dan Kelly (1997) ahli sosiologi mendefinisikan interaksi sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Contohnya dalam masyarakat pesisir, ketika buruh nelayan membutuhkan pemilik kapal untuk berlayar dan menciptakan kesepakatan bersama, yaitu pembagian hasil tangkapan.

Interaksi sosial dalam sosiologi mempunyai dasar pemikiran dari Weber mengenai tindakan sosial (*social action*). Weber beranggapan bahwa struktur sosial dan pranata sosial membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti dan makna. Konsep Weber ini melahirkan beberapa cabang keilmuan sosiologi yang mengkhususkan kepada kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan nama seperti "*the sociology of everyday life situations*" (Douglas, 1973), "*the sociology of familiar*" (Birenbaum dan Saragin, 1973)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

atau “*down to earth sociology*” (Henslim, 1981). Dengan demikian “*down to earth sociology*” memang mempelajari hal yang bersifat “*down to earth*” (praktis, realis) seperti hubungan antara dokter dan juru rawat, hubungan antara supir taksi dan penumpang taksi, hubungan antara penodong dengan korbannya. Oleh karena itu, untuk mempelajari hubungan-hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan lah pendekatan tertentu atau dikenal oleh *interactionist perspective* (Douglas, 1973). Pendekatan ini digunakan untuk memahami interaksi sosial, dijumpai juga pendekatan yang sering dikenal interaksionisme simbolik.

Konsep lain yang harus diperhatikan dalam bahasan mengenai interaksi sosial adalah konsep definisi situasi (*definition of the situation*) dari W.I. Thomas (1968). Thomas beranggapan seseorang tidak segera memberikan reaksi manakala ia mendapatkan rangsangan dari luar. Menurutnya, tindakan dari luar diseleksi melalui proses yang dinamakan definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini orang yang bersangkutan memberi makna pada rangsangan yang diterimanya itu. Contoh dalam masyarakat pesisir nelayan tidak semata mata bisa percaya kepada analisis meteorologi, kebanyakan nelayan lebih mempercayai arah angin dalam melihat situasi di tengah laut. Hal ini disebut definisi situasi.

Thomas membedakan dua macam definisi situasi, yaitu definisi situasi yang dibuat secara spontan oleh individu dan definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat. Kedua macam definisi situasi ini muncul secara bersaing, oleh karena itu menurutnya, moralitas yang berwujud aturan atau hukum muncul untuk mengatur kepentingan pribadi agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

B. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Soekanto (2013) menyatakan bahwa suatu interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya kontak sosial
2. Adanya komunikasi

Secara fisik, kontak akan terjadi apabila ada hubungan bada-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

niah, artinya ada interaksi fisik atau bertatap muka. Gejala sosial itu tidak harus berarti hubungan badan, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Semisal perkembangan teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu dengan lainnya melalui telepon, telegraph, radio, surat, dan lainnya sehingga tidak perlu suatu hubungan badaniah. Hal tersebut bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan badaniah tidak perlu menjadi syarat utama terjadinya kontak sosial.

Arti penting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerakan badan atau sikap), perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Komunikasi memungkinkan kerjasama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia. Komunikasi tidak selalu menghasilkan kerjasama, bahkan bisa memunculkan suatu pertikaian yang mungkin terjadi sebagai akibat salah paham atau karena masing-masing yang tidak mau mengalah.

Dalam berlangsungnya proses interaksi sosial, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, dimana hal ini mengakibatkan individu sampai pada titik kesepakatan bahkan kepercayaan, yaitu faktor imitasi, sugesti, dan identifikasi.

1. Faktor imitasi

Faktor ini telah diuraikan oleh Gabriel Tarde dalam Ahmadi (2007) yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan pada faktor imitasi saja. Hal tersebut misalnya pada anak yang sedang belajar bahasa, seakan-akan mereka mengimitasi dirinya sendiri, mengulang bunyi kata-kata, melatih fungsi lidah, dan mulut untuk berbicara. Kemudian ia mengimitasikan kepada orang lain, dan memang sukar orang belajar bahasa tanpa mengimitasi orang lain, bahkan tidak hanya berbahasa saja, tetapi juga tingkah laku tertentu, cara memberi hormat, cara berterima kasih, cara memberi isyarat, dan lain-lain kita pelajari pada mulanya mengimitasi.

2. Faktor Sugesti

Faktor yang dimaksud adalah pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, baik yang datang dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Karena itu dalam psikologi sugesti ini dibedakan adanya: a) Auto sugesti, yaitu sugesti terhadap diri yang datang dari dirinya sendiri; b) Hetero sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain.

3. Faktor Identifikasi

Faktor ini dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Misalnya identifikasi seorang anak perempuan untuk menjadi sama seperti ibunya. Proses identifikasi ini mula-mula berlangsung secara tidak sadar (secara dengan sendirinya) kemudian irrasional, yaitu berdasarkan perasaan atau kecenderungan dirinya yang tidak diperhitungkan secara rasional, dan yang ketiga identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma-norma, cita-cita, dan pedoman-pedoman tingkah laku orang yang mengidentifikasi itu. Identifikasi perlu dimulai lebih dahulu dengan teliti sebelum mereka mengidentifikasikan dirinya. Nyata bahwa saling hubungan sosial yang berlangsung pada identifikasi adalah lebih mendalam daripada hubungan yang berlangsung atas proses-proses sugesti maupun imitasi.

C. Pengertian Konflik

Menurut Lawang (1994), konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Konflik dapat terjadi pada setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, yang menuntut adanya menyelesaikan. Setiap orang sudah dapat dipastikan pernah mengalami konflik, tidak terkecuali Anda, baik konflik secara pribadi maupun kelompok. Konflik pribadi dapat terjadi antar individu atau dalam diri sendiri. Perbedaan pandangan atau kepentingan atau pendapat dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

menjadi pemicu bagi munculnya konflik pribadi. Konflik yang terjadi dalam diri individu dapat muncul manakala terdapat perbedaan antara idealisme yang dimilikinya dengan kenyataan.

Konflik yang terjadi antara individu dengan individu, misalnya konflik di antara sesama teman di sekolah. Konflik antara individu dengan kelompok, misalnya konflik antara seorang majikan dengan buruhnya. Sedangkan konflik antara kelompok dengan kelompok, misalnya para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Konflik kelompok dapat terjadi manakala dua kelompok mengalami perbedaan kepentingan atau perbedaan pendapat. Konflik yang tidak teratasi menjadi potensi laten bagi terjadinya disintegrasi sosial. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan proses sosial.

Konflik merupakan salah satu fakta sosial yang berbeda dengan fakta individual. Menurut Durkheim, fakta sosial memiliki tiga karakteristik yakni: bersifat eksternal terhadap individu, bersifat memaksa individu yang berada dalam lingkungan sosialnya, dan bersifat umum yakni tersebar di masyarakat. Fakta sosial meliputi: norma, moral, kepercayaan, kebiasaan, pola berfikir, dan pendapat umum, yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Fakta sosial tersebut disebut representatif kolektif.

Konflik merupakan proses sosial yang akan terus terjadi dalam diri manusia dan di dalam masyarakat, baik secara pribadi atau kelompok, dalam rangka perubahan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menentang lawannya. Konflik dapat memicu terjadinya kekerasan yang biasanya ditandai oleh adanya kerusakan, pengrusakan dan perkelahian. Kekerasan merupakan gejala yang muncul sebagai salah satu efek dari konflik.

Tindakan kekerasan ini sering tidak jelas tujuannya, ada kalanya hanya untuk kesenangan belaka, ikut dengan orang lain karena takut disebut tidak memiliki rasa kebersamaan, atau karena ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang sengaja menciptakan kekacauan, dan tidak lahir dari tuntutan-tuntutan kelompok yang menentang, serta pelakunya tidak memahami tindakan yang mereka lakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



D. Model Resolusi Konflik Masyarakat Pesisir

Para Sosiolog berpendapat bahwa akar dari konflik itu muncul diakibatkan oleh hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan kekuasaan, status sosial dan pembagian yang tidak merata. Masyarakat pesisir menemukan bahwa ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial sebagai pemicu konflik. Ketidakmerataan ini menimbulkan pihak-pihak yang berjuang untuk mendapatkannya. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan Horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk. Secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti di masyarakat pesisir, adanya tuan Perahu (Patron) dan Klien (Buruh Nelayan). Dalam masyarakat pesisir yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang dipegang bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara. Jika hal ini terjadi, maka dipastikan akan terjadi disintegrasi.
2. Kemajemukan Vertikal, artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena pendidikan yang mapan dan kekuasaan dan wewenang yang besar. Polarisasi masyarakat ini yang menimbulkan benih-benih konflik dalam masyarakat pesisir.

Resolusi konflik menurut Thomas dalam Tinsley (1998) didefinisikan sebagai: *conflict resolution can be in abstract terms an behaviors aimed at resolving perceived incompatibilities*. Sementara resolusi konflik menurut Krisberg (1999) juga didefinisikan *the process of concluding a dispute or conflict* (Pelupessy dan Muluk, 2002). Terdapat tiga kelas prosedur resolusi konflik, yaitu:

1. Prosedur pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*), yaitu prosedur dimana pengambilan keputusan dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Prosedur ini adalah prosedur yang paling baik untuk dilakukan karena memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berkonflik.
2. Prosedur pengambilan keputusan oleh pihak ketiga (*third*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

party decision making procedures), yaitu prosedur dimana pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat dalam konflik. Lebih tepatnya prosedur ini disebut juga sebagai pendekatan berorientasi hak.

3. Prosedur aksi sepihak (*separate action procedures*), yaitu prosedur dimana pihak-pihak yang terlibat konflik mengambil keputusan secara sepihak atau sendiri-sendiri. Prosedur ini seringkali menimbulkan konflik baru dan meningkatkan eskalasi konflik. Prosedur aksi disebut juga sebagai pendekatan berorientasi kekuatan.

Negosiasi mempunyai banyak tantangan untuk mengatasi masalah secara kolaboratif. Negosiasi memunculkan perilaku integratif, mendorong konflik ke arah konstruktif, ke arah proses pemecahan masalah, dan menuju cita-cita, yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan dari berbagai pihak sambil menjaga hubungan. Karenanya negosiasi adalah seni bagaimana membawa semua unsur yang terlibat dan menghubungkan mereka dalam satu sistem pengelolaan konflik yang terintegrasi. Semua unsur itu terdiri dari para pihak dengan semua kepentingan mereka yang berbeda, sumber daya alam yang tersedia, kebijakan dan pihak yang berwenang, dan tentu saja sejumlah masalah yang berkembang. Hal ini berarti negosiasi membutuhkan sebuah sistem pendekatan yang menangani interaksi antar unsur sumber daya alam, kolaborasi multi pihak, dan kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah.

Terdapat empat tahap pelaksanaan agar negosiasi dapat memberikan resolusi konflik (Van Noordwijk, 2000), yaitu:

1. Mengidentifikasi pelaku/stakeholder serta mengerti tujuan dan indikator yang digunakan untuk memprediksi kondisi lansekap saat ini dan masa mendatang;
2. Membangun piranti untuk menghubungkan rencana pemanfaatan SDA kelautan, keuntungan ekonomi, fungsi sosial yang dapat diterima oleh para pihak;
3. Mendukung proses negosiasi dalam Point 1 dan 2 untuk resolusi konflik ;
4. Menyediakan pilihan-pilihan teknis dan institusional yang diperbaiki untuk membantu para pihak mencapai cita-cita/pemecahan bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kekerasan tidak berakar pada satu segi kehidupan manusia. Unsur-unsur psikologis, kultural, sosial, ekonomi dan politik turut melahirkan konflik sosial dan kekerasan. Oleh sebab itu, sulit ditemukan metode yang menyatakan secara tegas bahwa konflik dan kekerasan dapat dihilangkan dari kehidupan manusia. Sehingga muncul dua kelompok dalam memberikan alternative pengelolaan konflik. Kaum pasifis seperti Erasmus of Rotteram, Emeric Cruce, William Penn, John Belers, dan Abbe de Saint-Piere berpendapat bahwa penggunaan instrumen kekerasan merupakan alternatif solusi masalah-masalah sosial yang selalu dihadapi umat manusia. Sedangkan kalangan konstruksionis berpendapat bahwa kekerasan sesungguhnya dapat dilenyapkan dalam perjalanan peradaban manusia.

Tubagus Faturahman menawarkan lima model regulasi konflik, yaitu:

1. Partisi, yaitu pemisahan secara tegas antara satu etnis dengan etnis lain. Model ini jarang sekali digunakan dan hal ini hanya dimungkinkan apabila sebuah etnis benar-benar hidup terpisah dari garis demarkasi negara.
2. Dominasi, yaitu satu dominasi etnis terhadap etnis lain, biasanya melalui kekerasan atau tindakan diskriminatif. Model ini mendasarkan pada asumsi kekerasan sebagai alternatif mengakhiri kekerasan lebih lanjut.
3. Proses asimilasi. Model ini adalah bentuk halus dan maju dari model kedua yang dilakukan secara alami.
4. Konsolidasi. Model ini mengakui eksistensi setiap perbedaan yang ada dan mencoba untuk mengharmonikan perbedaan-perbedaan itu. Dalam model ini kelompok mayoritas bukan pihak yang menentukan dalam berbagai hal, tetapi berbagai ketentuan diputuskan berdasarkan konensus dan kompromi.
5. Pengakuan terhadap semua etnis, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politis.

Model Kerangka Kerja pada Akhir tahun 1960-an, Johan Galtung menawarkan model konflik yang mencakup konflik simetris dan konflik asimetris. Konflik dapat dilihat sebagai segitiga vertikal *Contradiction* (C), *Attitude* (A), dan *Behavior* (B). Tiga komponen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

itu harus dihadirkan secara bersama-sama dalam melihat konflik secara menyeluruh dalam masyarakat pesisir. Galtung melihat konflik sebagai sebuah proses dinamis dimana struktur, sikap dan perilaku terus menerus merubah dan mempengaruhi satu sama lain.

Para pihak yang terlibat dalam konflik kemudian membentuk berbagai struktur untuk mencapai kepentingan mereka. Mereka mengembangkan sikap permusuhan dan perilaku konfliktual. Oleh sebab itu, untuk menghentikan kekerasan langsung dengan merubah perilaku konflik. Untuk menghentikan kekerasan struktural dengan melakukan merubah kontradiksi stuktural dan ketidakadilan. Sedangkan untuk merubah kekerasan kultural adalah dengan merubah berbagai sikap dalam masyarakat pesisir.

Model eskalasi konflik menggambarkan bagaimana konflik berpindah dari satu tahap ke tahap lain yang membentuk kurva normal eskalasi dan deskalasi konflik. Tahap perubahan itu dimulai dari perbedaan yang merupakan bagian dari seluruh perkembangan sosial. Berkembang melalui bibit-bibit kontradiksi yang mungkin tampak atau bersifat laten, naik lagi melalui proses polarisasi dimana antar para pihak mulai tampak saling bertentangan dan puncaknya adalah pecahnya kekerasan langsung ataupun perang.

Selain itu, Rombston menawarkan *hourglass model* yang menggambarkan spektrum konflik, tahap dan repons dalam resolusi konflik. Model ini menunjukkan adanya penyempitan ruang politik yang menandai eskalasi konflik dan perluasan ruang politik pada deeskalasi konflik. Penanganan konflik (*conflict settlement*) berkaitan dengan negosiasi ataupun mediasi diantara pihak-pihak utama yang saling bertentangan dengan tujuan utama untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima dan saling menguntungkan. Penahanan konflik (*conflict containment*) meliputi *peace keeping preventif*, pembatasan peran dan penjagaan batas wilayah dalam masyarakat pesisir

Konflik merupakan sesuatu yang instrinsik dan aspek perubahan sosial yang tidak dapat dihindari. Salah satu bentuk kebiasaan yang tipikal dalam merespon konflik adalah prioritas yang berlebihan dalam mempertahankan kepentingan kita sendiri. Oleh sebab itu, disini ditawarkan lima pendekatan terhadap konflik yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dibedakan berdasarkan perbedaan tinggi rendahnya perhatian terhadap diri sendiri dan orang lain.

Pertama, apabila seseorang memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap dirinya dan memiliki perhatian yang rendah terhadap orang lain (*egotending style*). Kedua, gaya yang lebih memperhatikan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri (*yield style*). Ketiga, model penghindaran (*avoid style*), yaitu model yang memiliki perhatian yang sangat rendah terhadap kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Keempat, keseimbangan dalam memperhatikan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain yang membawa kepada sikap akomodatif dan kompromis. Kelima, perhatian yang tinggi terhadap kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Hal ini berimplikasi pada penegasan terhadap kepentingan sendiri, tetapi secara seimbang sadar akan aspirasi dan kebutuhan orang lain, untuk kemudian memunculkan energi untuk mencari *problem solving* yang kreatif sebagai jalan keluar.

E. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan pengertian interaksi menurut beberapa ahli?
2. Bagaimana pola interaksi yang terjadi di masyarakat pesisir?
3. Apa saja syarat-syarat terjadi interaksi? Sebutkan dan jelaskan alasannya!
4. Jelaskan pengertian konflik? Kenapa konflik dan interaksi saling berkaitan di masyarakat pesisir? jelaskan!
5. Sebutkan faktor penyebab konflik di masyarakat pesisir?
6. Bagaimana model yang cocok untuk resolusi konflik di masyarakat pesisir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan VIII
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan pemberdayaan masyarakat.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari pemberdayaan masyarakat.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemberdayaan.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan proses pemberdayaan masyarakat pesisir.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian dari pemberdayaan masyarakat.
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan prinsip pemberdayaan.
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan tahapan proses pemberdayaan masyarakat pesisir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pembedayaan secara terjemahan berasal dari istilah asing, yaitu *empowerment*. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kondisi sekarang yang tidak mampu sehingga melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan akan menjadi kekuatan dalam mereka memecahkan masalah kehidupannya.

Pemberdayaan menurut World Bank dalam Narayan et.al, (2002:98) diartikan sebagai: *Empowerment are expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that affect their life*” (pemberdayaan adalah perluasaan aset-aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan mempengaruhi, mengontrol, serta mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya”.

Pemberdayaan dalam beberapa konsep pembangunan selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, hubungan jaringan dan keadilan/advokasi. Menurut Lee (2001), tiga konsep penting yang berkaitan dengan pemberdayaan sehingga mereka bisa mandiri, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Mengembangkan sebuah perasaan yang lebih positif dan potensial akan diri sendiri.
2. Membangun konstruksi pengetahuan dan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai perspektif kritis mengenai realita-realita sosial dan politik
3. Mengolah sumber-sumber, strategi dan kompetensi untuk memperoleh tujuan-tujuan personal dan kolektif.

Secara substansial, tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan mereka yang kurang beruntung (*disadvantages*) atau tidak berdaya (*powerless*) dapat menjadi berdaya (*empowered*). Oleh karena itu, melalui pemberdayaan diharapkan terjadi perubahan kondisi kearah yang lebih baik. Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik sehingga mereka memiliki daya/kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.

Pemberdayaan merupakan *output* dari proses pengembangan masyarakat dimana akhirnya masyarakat berada pada kondisi mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan (Suharto 2009:59). Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

proses. Proses pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua kecenderungan, yaitu:

1. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemauan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset materil guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley & Marsden, 1984: 111). Kecenderungan proses yang pertama ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Kecenderungan kedua atau sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menekankan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 2014:218-219) dengan rincian berikut:

1. Pemungkinan: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah nyata menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), seperti pemberian modal, sarana dan prasarana, pelatihan, pemasaran dan sebagainya serta terbukannya akses kepada peluang (*opportunities*) yang akan membuat masya-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



rakat semakin berdaya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, menghindari terjadi persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan kepada masyarakat bukan berarti masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program atau proyek yang sifatnya pemberian atas dasar belas kasihan (*charity*), karena pada hakikatnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhir pemberdayaan adalah memandirikan, memampukan, dan membangun kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

B. Prinsip Pemberdayaan

Beberapa prinsip pemberdayaan disampaikan oleh Suharto (2014:216-217) terdapat beberapa prinsip pemberdayaan, yaitu:

- Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

- Masyarakat harus mampu melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

C. Tahapan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Banyak pakar pekerjaan sosial dan sosiolog memandang dan berpendapat mengenai bagaimana proses pembangunan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengentasan kemiskinan. Berikut ini disajikan pendapat mengenai proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

Menurut Dubios dan Miley (2000:60), proses pendekatan yang dilakukan dalam pekerjaan sosial mulai dari yang tradisional sampai dengan yang merefleksikan praktek berbasis pemberdayaan secara umum, yakni:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Mempersiapkan kerjasama
2. Menjalin relasi kemitraan
3. Menartikulasikan tantangan-tantangan.
4. Mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada.
5. Mendefinisikan arah yang ditetapkan
6. Mengeksplorasi sistem-sistem sumber
7. Menganalisis kapabilitas sumber
8. Menyusun kerangka pemecahan masalah
9. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber
10. Memperluas kesempatan-kesempatan
11. Mengakui keberhasilan

Menurut Iskandar (2012:96), tahap-tahap dalam melakukan pengorganisasian masyarakat untuk membangun kekuatan masyarakat terdapat sembilan tahapan, yaitu:

1. Mengetahui masyarakat
2. Mengetahui ukuran masyarakat
3. Membentuk dan menciptakan kontak
4. Membawa warga masyarakat bekerjasama
5. Mengembangkan kepemimpinan masyarakat
6. Bekerja dengan organisasi masyarakat
7. Penentuan bidang prioritas
8. Membangun kekuatan politis
9. Strategi membantu diri sendiri

Berdasarkan teknik-teknik pemberdayaan yang diungkapkan diatas, memanfaatkan sumber daya merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh pekerjaan sosial dan ahli sosial dalam memberdayakan masyarakat lokal. Tanpa memanfaatkan sumberdaya baik dari dalam maupun dari luar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Padahal dengan memanfaatkan sumberdaya tersebut dapat meningkatkan kekuatan dan menambahkan sumber-sumber lingkungan, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi masyarakat secara lebih luas.

D. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan pengertian pemberdayaan menurut beberapa ahli!
2. Jelaskan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir!
3. Bagaimana tahapan dan proses pemberdayaan?
4. Bagaimana mahasiswa melihat pemberdayaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan?Jelaskan!



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan IX
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan perubahan sosial masyarakat pesisir.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari perubahan sosial.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat pesisir.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan sosial.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial.
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat pesisir.
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan gerakan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB IX

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR

A. Pengertian Perubahan Sosial

Individu dan masyarakat tidak akan terlepas dari namanya perubahan. Perubahan wajar dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi perubahan tersebut menjadi fenomena sosial, karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan akan terlihat jelas ketika tatanan sosial dan kehidupan masyarakat lama dengan masyarakat baru dibandingkan. Kehidupan masyarakat pesisir dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah mengenal listrik, speedboat atau alat-alat yang membantu mereka melaut.

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada masyarakat berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaitan satu sama lainnya. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaman Soemardi, bahwa perubahan diluar bidang ekonomi tidak dapat dihindari. Perubahan bersifat cepat dan sulit diprediksi.

Beberapa ahli mendefinisikan perubahan sosial sebagai berikut:

1. **Bruce J. Cohen**, mengemukakan bahwa perubahan sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

adalah perubahan struktur sosial dan perubahan pada organisasi sosial. Misalnya perubahan dalam satu segi dari kehidupan sosial menunjukkan perubahan karena terjadi perubahan dalam struktur sosial dan organisasi sosial. Yang merupakan syarat utama dalam perubahan itu adalah system sosial dalam pergaulan hidup yang menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

2. **Gillin dan Gillin**, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.
3. **Samuel Koenig**, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.
4. **Kingsley Davis**, mengartikan perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan.
5. **Parsudi Suparlan**, perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial. Termasuk didalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan.
6. **Hans Garth dan C. Wright Mills**, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran, dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial.
7. **Paul B. Horton dan Chester L. Hunt**, perubahan sosial ialah suatu hal yang tetap dan selalu ada dalam alam semesta. Masyarakat generasi baru tidak mungkin meniru atau mengambil alih kebudayaan generasi sebelumnya. Generasi baru pasti selalu menginginkan perubahan.

Perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan terdapat perbedaan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat, sedangkan perubahan kebudayaan mempunyai istilah yang lebih luas, termasuk segala perubahan dalam kebudayaan seperti kepercayaan, pengetahuan, bahasa, teknologi dan lain-lain. Kejadian dalam perubahan ke-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



budayaan, seperti perubahan teknologi, akan dibincangkan jika ia memberi pengaruh dalam perubahan proses sosial dan struktur sosial.

B. Faktor-Faktor Perubahan Sosial di Masyarakat Pesisir

Secara teoritis, perubahan sosial bisa dianalisa melalui beberapa faktor perubahan. Pada masyarakat pesisir perubahan sosial menjadi hal yang sangat wajar dikarenakan norma-norma dan lembaga sosial berubah dengan cepat seiring perkembangan teknologi. Ada empat faktor utama dalam perubahan sosial, yaitu penduduk, kebudayaan, teknologi dan gerakan sosial.

1. Penduduk

Perubahan penduduk akan membawa perubahan dalam berbagai bagian masyarakat. Ini terlihat dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang biasanya memerlukan organisasi sosial yang lebih kompleks dan cara yang lebih tepat untuk memperoleh nafkah dan memantapkan pengawasan sosial. Pertambahan penduduk, seperti faktor lain dalam perubahan sosial.

2. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang sangat penting. Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terjadi. Kebudayaan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Menurut Koentjaraningrat, faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari kebudayaan baru adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya.
- b. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan
- c. Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

Terjadi juga dalam masyarakat yang tergolong fanatik terhadap kebudayaan-kebudayaan lama, tidak mudah dihilangkan, tetapi dengan adanya kebudayaan baru, maka terjadi benturan-benturan kebudayaan. Jika kebudayaan baru lebih besar fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



maka kebudayaan lama akan ditinggalkan dan lebur menjadi satu dengan kebudayaan lama. Perubahan kebudayaan di masyarakat pesisir tergolong lebih cepat akibat adanya inovasi. Dahulu masyarakat pesisir Riau mencari ikan menggunakan sampan biasa, dengan adanya inovasi teknologi, nelayan mencari ikan menggunakan kapal bermotor atau disebut dengan speedboat.

Ogburn dan Nimkoff menyebut penemuan baru sebagai *social invention*, yaitu penciptaan pengelompokan dari individu-individu yang baru atau penciptaan istiadat yang baru maupun suatu perilaku sosial yang baru. Yang terpenting adalah akibatnya terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang kemudian berpengaruh pada bidang-bidang kehidupan lainnya.

3. Teknologi

Teknologi mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Bagaimana teknologi mempunyai peran dalam memengaruhi perubahan manusia bukanlah sebuah hal yang perlu dipertanyakan lagi. Manusia tidak akan mampu hidup tanpa teknologi. Manusia purba misalnya, mereka telah lama mengenal teknologi sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan teknologi itu terbuat dari bahan-bahan atau materi yang sangat sederhana, seperti bamboo, batu dan kayu.

• August Comte

Berpendapat mengenai positivisme dapat menjadi rujukan dalam menggambarkan peranan akan manusia dalam memengaruhi kemajuan hidupnya. Pada masa inilah, pikiran manusia banyak berkembang hingga akhirnya manusia mampu menciptakan berbagai alat untuk mempermudah aktivitasnya.

Teknologi merupakan hasil perkembangan rasio manusia dan menjadi sebuah simbol peradaban. Teknologi pada akhirnya justru diposisikan sebagai “tuhan” bagi manusia modern, manusia menjadi hamba bagi teknologi. Manusia menjadi sangat bergantung pada teknologi, dengan menguasai teknologi, seolah-olah manusia telah mampu menguasai dunia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- **Emile Durkeim**

Ketika manusia hanya mampu menciptakan teknologi yang masih sangat sederhana, maka hampir setiap manusia akan mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Untuk mengoperasikan teknologi tersebut, manusia tidak memerlukan kemampuan atau keterampilan khusus. Laki-laki atau perempuan dapat dengan mudah menggunakan berbagai alat bantu untuk mengerjakan pekerjaan di sawah, sehingga tidak perlu ada pembagian kerja yang sangat spesifik antara laki-laki dan perempuan.

Akal manusia selalu berkembang, maka terciptalah berbagai teknologi. Selain perkembangan jumlah penduduk, perubahan mekanisme pembagian kerja secara tidak langsung juga sangat dipengaruhi perkembangan teknologi. Semakin rumitnya teknologi yang diciptakan manusia, secara tidak langsung manusia memerlukan berbagai keterampilan untuk mengoperasikan teknologi tersebut, maka semakin rumit pula pembagian kerja dalam masyarakat.

4. Gerakan Sosial

Gerakan sosial atau *social movement* memberi pengaruh dalam perubahan sosial, tetapi terbatas menurut konteks sosial dimana dia berlangsung. Jadi, gerakan sosial dalam kedaulatannya lahir akibat kekecewaan terhadap struktur sosial yang ada. Pada masyarakat pesisir, gerakan sosial ini menjadi bagian dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat pesisir Jawa misalnya, melawan pemerintah terkait aturan tidak boleh menangkap ikan menggunakan cantrang.

C. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan definisi perubahan sosial menurut para ahli?
2. Jelaskan faktor perubahan sosial masyarakat pesisir?
3. Bagaimana mahasiswa memandang perubahan sosial di masyarakat pesisir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan X
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan pemanfaatan teknologi bagi masyarakat pesisir.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari teknologi.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan teknologi bagi masyarakat pesisir..

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian teknologi.
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pemanfaatan teknologi bagi masyarakat pesisir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB X

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI MASYARAKAT PESISIR

A. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sangat berkembang di masyarakat. Teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data, meliputi di dalamnya: memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi. Perkembangan TIK pun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Menurut Martin (2002), teknologi informasi sendiri berarti, teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi, seperti pengusaha bidang agribisnis juga dapat mendapatkan informasi-informasi berupa teknologi baru pada bidang pertanian yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan usahanya (Trimo, 2006).

Teknologi menurut Djoyohadikusumo (1994) berkaitan erat dengan sains dan perekayasaan. Dengan kata lain, teknologi mengandung dua dimensi, yaitu sains dan perekayasaan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat (Anonim, 2003) sehingga kita dapat meniru atau menyerap kebudayaan-kebudayaan tersebut menjadi budaya cara hidup kita. Begitu juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



menurut Natakusuma (2002), dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer internet, e-mail. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui tatap muka tapi melalui e-learning (Rosenberg, 2001).

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Masyarakat Pesisir

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang dikelilingi oleh potensi kelautan yang cukup tinggi. Potensi tersebut jarang dimanfaatkan secara maksimal oleh para nelayan di sekitaran wilayah pesisir Riau. Dalam riset Siti (2017), terlihat nelayan hanya menggunakan cara tradisional, yaitu menongkah. Cara ini dirasa kurang optimal karena belum bisa mendapatkan hasil yang banyak. Padahal mengacu pada program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), yaitu berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional, bidang kemaritiman merupakan fokus pembangunan pemerintah (Renstra Kemkominfo 2015-2019).

Pemerintah melalui sektor TIK perlu menjawab keadaan yang dialami oleh masyarakat nelayan ini. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi perlu diperkenalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan agar dapat bersaing dengan nelayan asing yang memiliki peralatan lebih lengkap dan modern. Akses masyarakat nelayan terhadap informasi perlu ditingkatkan.

Dengan memperkenalkan teknologi informasi diharapkan para nelayan dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk menghasilkan produksi sumber daya alam kelautan yang maksimal. Karena hal tersebut, maka Kemkominfo, pemerintah daerah, dan dinas kemaritiman setempat perlu bersinergi untuk membuat suatu perencanaan strategis pembangunan sistem informasi secara terpadu dan menyeluruh yang bertujuan untuk menetapkan suatu strategi sistem informasi masyarakat nelayan dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi akses sistem informasi apa saja yang diperlukan.

Nelayan membutuhkan sistem informasi karena adanya kebutuhan informasi bagi masyarakat nelayan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Sistem informasi dapat memenuhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kebutuhan informasi masyarakat nelayan dengan cepat. Sistem informasi yang dibuat adalah sistem yang menyediakan berbagai informasi mengenai area tangkap, cuaca, harga ikan dan pesebaran ikan. Sistem informasi bagi nelayan sebaiknya bersifat simple dan *user friendly*. Salah satu alat untuk mendiseminasikan informasi nelayan adalah menggunakan handphone mengingat pengguna handphone di Indonesia cukup tinggi.

Pembangunan teknologi informasi hendaknya memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakat nelayan. Oleh karena itu, dengan menggunakan kajian dan memperhatikan pola produktivitas masyarakat nelayan maka diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan secara spesifik akan teknologi informasi kenelayanan.

C. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan pengertian teknologi?
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi di masyarakat pesisir?
3. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup sosiologi masyarakat pesisir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: FISIP
Mata Kuliah	: Sosiologi Masyarakat Pesisir
Pertemuan	: Pertemuan XI
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit
Dosen	: Dr. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si
Metode	: Ceramah dan Diskusi

I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan masyarakat pesisir & kemiskinan.

II. Kompetensi Dasar

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari kemiskinan.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab timbulnya kemiskinan masyarakat pesisir. mempengaruhi perubahan sosial masyarakat pesisir.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan kategori kemiskinan masyarakat pesisir.
- d. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori kemiskinan.
- e. Mahasiswa mampu menjelaskan paradig kemiskinan masyarakat pesisir.

III. Indikator

- a. Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian kemiskinan
- b. Mahasiswa telah mampu menjelaskan faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir.
- c. Mahasiswa telah mampu menjelaskan kategori kemiskinan masyarakat pesisir.
- d. Mahasiswa telah mampu menjelaskan teori-teori kemiskinan.
- e. Mahasiswa telah mampu menejaskan paradigma kemiskinan masyarakat pesisir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB XI

MASYARAKAT PESISIR & KEMISKINAN

A. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Andist (2008), kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan kemiskinan *absolute* apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong kemiskinan relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan masyarakat pesisir dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmapuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Menurut Suharto dalam Nawawi (2009), kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang bermatra multidimensional. SMERU, misalnya, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Sajogyo (1988) mengartikan kemiskinan tidak sebatas hanya dicerminkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan pengeluaran. Sajogyo memandang kemiskinan secara lebih kompleks dan mendalam dengan ukuran delapan jalur pemerataan, yaitu rendahnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

peluang berusaha dan bekerja, tingkat pemenuhan pangan, sandang dan perumahan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kesenjangan desa dan kota, peran serta masyarakat, pemerataan, kesamaan dan kepastian hukum dan pola keterkaitan dari beberapa jalur tersebut.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang adalah umumnya negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang menjadi prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar masyarakat miskin. Seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Ellis (1984) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolute. Garis kemiskinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang perhari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*property threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlakukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aeka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4).

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto *et.al.*, 2004). Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin.

Kemiskinan adalah ketidakmapuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001). Yang dimaksud kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan atau makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dalam konteks politik ini, Friedman mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang adapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jejaring sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto *et.al.*, 2004).

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah dan merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam di masyarakat miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya.

Teori ‘kemiskinan budaya’ yang dikemukakan oleh Oscar Lewis, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambatseseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan ‘ketidakmauan’ masyarakat miskin untuk bekerja, melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan masyarakat miskin dapat bekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



B. Teori-Teori Kemiskinan

1. Teori Neo-Liberal

Teori neo-Liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill. Intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *The Wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, *The Road to Seridom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedapnkan azas *Laissez faire*, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72) disebut sebagai ide yang mengunggulkan “mekanisme pasar bebas” dan mengusulkan “*the almost complete absence of state’s intervention in the economy*”

Para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat “residual”, sementara dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai “penjaga malam” yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon, 1991; Spicker, 1995; Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998). Penerapan program-program *structural adjustment*, seperti program jaringan pengaman sosial (JPS) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sesungguhnya merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini.

2. Teori Demokrasi-Sosial

Keyakinan yang berlebihan terhadap keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum demokrasi-sosial. Berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Angels, pendukung demokrasi-sosial menyatakan bahwa:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

A free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation... a society is just when people needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated (Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998:91 dan 97).

Teori sosial demokrasi memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap sumber-sumber kemasyarakatan. Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economy*) dan 'ekonomi-manajemen permintaan' (*demands-management economics*) gaya Keynesian yang muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an.

Sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi Keynesian. Meskipun kaum demokrasi-sosial mengkritik pasar bebas, mereka tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai *evil* yang harus dimusuhi dan dibuang jauh. Sistem kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem Negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. "*The welfare state acts as the human face of capitalism*", demikian menurut Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:79).

Menurut pandangan demokrasi-sosial, strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori demokrasi-sosial. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapat atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dimana orang akan memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

Dirumuskan secara tajam, maka dapat dikatakan bahwa kaum neo-liberal memandang strategi kemiskinan yang melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan. Sebaliknya pendukung demokrasi-sosial meyakini bahwa penanganan kemiskinan yang bersifat residual, berorientasi pada proyek jangka pendek, justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya juga singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila kaum neo-liberal melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat “kebebasan”, kaum demokrasi-sosial justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan”, karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya.

C. Paradigma Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Sadar bahwa isu kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa aktual, pengkajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan pada pertengahan 1980-an, upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah:

1. Konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni “kemiskinan pendapatan” atau “income-poverty” (Chambers, 1997). Pendekatan ini banyak dikritik oleh pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relatif, di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun Indonesia pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan. Ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di Tanah Air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.

3. Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh.

1. Paradigma Lama

Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigm neo-liberal yang dimotori oleh Bank Dunia dan didasari oleh teori-teori modernisasi yang sangat mengagungkan pertumbuhan ekonomi dan produksi (*the production-centred model*) (Suharto, 2002). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan”.

Meskipun GNP dapat dijadikan ukuran untuk menelaah performa pembangunan suatu negara, banyak ahli menunjukkan kelemahan pendekatan ini. Haq (1995), misalnya, menyatakan bahwa GNP merefleksikan harga-harga pasar dalam bentuk nilai uang. Harga-harga tersebut mampu mencatat kekuatan ekonomi dan daya beli dalam sistem tersebut. Namun demikian, harga-harga dan nilai uang tidak dapat mencatat distribusi, karakter atau kualitas pertumbuhan ekonomi. GNP juga mengesampingkan segala aktifitas yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti pekerjaan rumah tangga, pertanian subsistem, atau pelayanan-pelayanan yang tidak dibayar. Dan yang lebih serius lagi, GNP memiliki dimensi-tunggal dan karenanya ia gagal menangkap aspek budaya, sosial, politik dan pilihan-pilihan yang dilakukan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Haq (1995:46) menyatakan:

GNP reflects market prices in monetary terms. Those prices quietly register the prevailing economic and purchasing power in the system, but they are silent about the distribution, character or quality of economic growth. GNP also leaves out all activities that are not monetized household work, subsistence agriculture, unpaid services. And what is more serious, GNP is one-dimensional: it fails to capture the cultural, social, political and many other choices that people make.

Seperti halnya GNP, pendekatan *income poverty* juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut Satterhwaite (1997) sedikitnya ada tiga kelemahan pendekatan *income poverty*:

1. Kurang memperhatikan pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk kesengsaraan orang miskin.
2. Tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskin dalam menghadapi kemiskinannya.
3. Tidak menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Karena pendekatan GNP dan *income poverty* memiliki kelemahan dalam memotret kemiskinan, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan berbagai pendekatan alternatif. Diantaranya adalah kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen (1973); *Social Accounting Matrix* (SAM) oleh Pyatt dan Round (1977), dan *Physical Quality of Life Index* (PQLI) oleh Morris (1977).

2. Paradigma Baru

Bila dicermati, semua paradigma kemiskinan terdahulu masih tetap menyimpan kelemahan. Konsepsinya masih terlihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Akibatnya, aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya belum tersentuh secara memadai. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannya terfokus pada kondisi kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

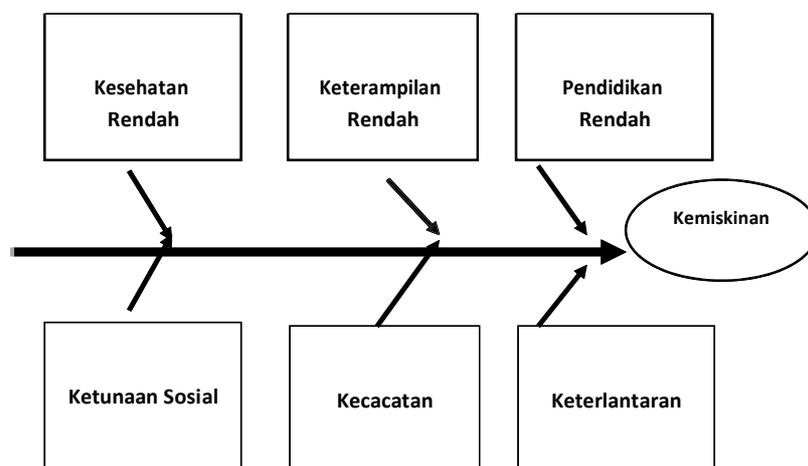
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



“orang yang serba tidak memiliki”: tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dan sebagainya. Metodenya masih berpijak pada *outcomes indicators* sehingga belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Masyarakat miskin dilihat hanya sebagai “korban pasif” dan objek penelitian. Bukan sebagai manusia yang memiliki sesuatu yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.

Kelemahan paradigma lama di atas menuntut perubahan pada fokus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma demokrasi-sosial dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kembali konsep keberfungsian sosial sebagai paradigma baru yang lebih sejalan dengan misi dan prinsip pekerjaan sosial.

Kemiskinan menjadi prioritas masalah untuk ditanggulangi/dipecahkan. Kondisi miskin ini disebabkan oleh enam masalah kesejahteraan sosial yaitu keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, pendidikan rendah, keterampilan rendah, dan kesehatan rendah. Tetapi kemiskinan juga dapat mengakibatkan timbulnya keenam masalah tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut model kerangka tulang ikan kemiskinan sebagaimana dikemukakan Soedjadi (1997).



Gambar 1. Model Kerangka Tulang Ikan Kemiskinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



D. Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, yaitu :

1. Pendidikan yang terlampau rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan/keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan tersebut miskin dikarenakan tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini menyangkut mentaliter dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, atau bersikap pasif dalam hidupnya. Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau family yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.

3. Keterbatasan sumber alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya alamiah miskin. Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya: tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral, dan sebagainya. Dengan demikian layakah kalau miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.

4. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

5. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal merupakan sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal bagi negara-negara yang sedang berkembang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran akan modal.

6. Beban keluarga

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak/meningkat pula tuntutan beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda mereka dan bersifat laten.

E. Kategori Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Indikator kemiskinan yang menjadi sumber data program penanggulangan kemiskinan mengacu pada kriteria rumah tangga sasaran yang ditertibkan oleh BPS meliputi 14 variabel, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli 1 (satu) setel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu (satu) atau 2 (dua) kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- seperti; sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Berdasarkan tingkat kerentanan kemiskinan, maka masalah kemiskinan data dibagi menjadi:

- a. Hampir miskin.
Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin, apabila memenuhi sebanyak 6 s/d 9 variabel dari indikator di atas.
- b. Miskin.
Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin, apabila memenuhi sebanyak 9 s/d 12 variabel dari indikator di atas.
- c. Sangat Miskin/Masyarakat Miskin.
Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori sangat miskin/masyarakat miskin, apabila memenuhi sebanyak 12 s/d 14 variabel dari indikator di atas.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formulasi penanganan kemiskinan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan masih harus terus menerus dikembangkan. Terdapat banyak teori dalam memahami kemiskinan. Bila dipetakan, literatur mengenai kebijakan sosial dan pekerjaan sosial menunjukkan dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neo-liberal dan demokrasi-sosial (*social-democracy*). Dua paradigma atau pandangan ini kemudian menjadi cetak biru dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program anti kemiskinan.

F. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan pengertian kemiskinan!
2. Jelaskan faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir?!
3. Jelaskan kategori kemiskinan masyarakat pesisir?
4. Jelaskan dan analisis kemiskinan masyarakat pesisir menggunakan teori-teori kemiskinan?
5. Bagaimana beberapa paradigma kemiskinan masyarakat pesisir? Jelaskan!



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, dkk. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agus, F., Farida and Noordwijk, M. van. (Editors), 2004. *Hydrological Impacts of Forest, Agroforestry and Upland Cropping as a Basis for Rewarding Environmental Service Providers in Indonesia. Proceedings of a workshop in Padang/Singkarak, West Sumatra, Indonesia. 25-28 February 2004*. ICRAF-SEA, Bogor, Indonesia
- BPPKI Surabaya, “Model Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kalangan Masyarakat Petani dan Nelayan,” 2015.
- Badan Litbang SDM Kominfo, “Survey Kebutuhan Informasi Masyarakat di Daerah Perbatasan, Tertinggal dan Nelayan.,” 2015
- Dahuri, Rokhmin, dkk. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Dubios, Brenda & Milley, K. Karla. 2005. *Social Work- an empowering profession*. Publisher: Pearson Educ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Djoyohadikusumo, 1994. Berbagai Definisi Teknologi Informasi <http://www.hdn.or.id/index.php/research/2006/>
- Elly, Setiadi, Usman, dkk. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Iskandar, Jusman. 2012. *Strategi Desa Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Kopma STKS
- Johnson, Paul Doyle. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, penerjemah Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kinseng, Rilus A. 2014. *Konflik Nelayan*. Jakarta: Buku Obor.
- Kriesberg, Louis. 1973. *The Sociology of Social Conflicts*. New Jersey: Prentice-Hall
- Lfe, Jim. 1995. *Community Development, Creating Communities Alternatives-Vidion, Analysis and Practice*. Australia: Longman
- Lfe, Jim & Frank. 2012. *Alternative Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Penerjemah: Sastrawan Manulang dan Nurul Yakin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Martin, 2002. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran <http://www.slideshare.net/guest2d1e29/6januari2010>
- Narayan, D. Bonds and Bridges., 2002. *Social Capital and Poverty*. Washington DC. World Bank.
- Natakusumah E.K. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian Informatika-LIPI
- P. Mayadewi, "Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi (Studi Kasus: Perpustakaan Daerah Kota XYZ)," *J. Infotel*, vol. 6, 2014.
- Rosenberg, 2001. *Pengaruh Teknologi Informasi di dalam Masyarakat Sosial*, <http://whaysworld.wordpress.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- Soejono, Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- S. Roucek. Joseph, Warren dkk. 2006. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sanderson. K. Stephen. 2003. *Makro Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satria, A. 2004. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Cisendo.
- Suseno, A. 2008. *Diktat Penanganan Hasil Perikanan*. Sidoarjo: Akademi Perikanan.
- Trimo, 2006. *Pengertian Kelompok Tani*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weber, Max. 2009. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Y, Wahyudin. 2015. *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir*. Makalah Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.